**PERAN KOMITE MADRASAH DALAM PENERAPAN MANAJEMEN BERBASIS MADRASAH DI MTS NEGERI I MODEL PALEMBANG**



**SKRIPSI SARJANA S.1**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh**

**gelar Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I)**

**Oleh**

**YAYAN SHOLIHIN**

**NIM : 08 29 039**

**Jurusan Kependidikan Islam**

**FAKULTAS TARBIYAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

**RADEN FATAH PALEMBANG**

**2012**

Kepada Yth.

Hal : **Pengantar Skripsi** Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah

IAIN Raden Fatah

di-

Palembang

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Setelah kami perikssa dan diadakan perbaikan-perbaikan seperlunya, maka skipsi yang berjudul : **“PERAN KOMITE MADRASAH DALAM PENERAPAN MANAJEMEN BAERBASIS MADRASAH DI MTs N I MODEL PALEMBANG”**, yang ditulis oleh saudara YAYAN SHOLIHIN NIM 08 29 039, telah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah Palembang.

Demikian terima kasih.

Wassalamualaikum.

Palembang, Juni 2012

Pembimbing I Pembimbing II

Zuhdiyah, M. Ag. M. Hasbi, M. Ag.

NIP. 19720824 200501 2 001 NIP. 150 370 129

Skripsi berjudul:

**PERAN KOMITE MADRASAH DALAM PENERAPAN MANAJEMEN BAERBASIS MADRASAH DI MTs N I MODEL PALEMBANG**

Yang ditulis oleh saudara **YAYAN SHOLIHIN, NIM 08 29 039**

Telah dimunaqosahkan dan dipertahankan

Di depan Panitia Penguji Skripsi

Pada Tanggal 26 September 2012

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I.)

Palembang 26 September 2012

Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Fakultas Tarbiyah

Panitia penguji skripsi

Ketua Sekretaris

**Fitri Oviyanti, M.Ag. M. Hasbi, M.Ag.**

**NIP. 19761003200112 2 001 NIP. 19760131 200501 1 002**

Penguji Utama : **Drs. Saipul Annur, M.Pd.** **(……………………….)**

**NIP. 19701208 199603 1 003**

Anggota Penguji : **Leny Marlina, M.Pd.I.**  **(…….…………………)**

**NIP. 19790828 200701 2 019**

Mengetahui

Dekan Fakultas Tarbiyah

**Drs. Kasinyo Harto, M.Ag.**

**NIP. 19710911 199703 1 004**

**MOTTO**

**“Selangkah Kakiku Melangkah**

**Di Belakang Jurang Bagiku”**

**Kamut**

**“Jangan Pernah Merobohkan Pagar**

**Tanpa Mengetahui Mengapa Didirikan.”**

**“Kalau Tak Mampu Jadi Pohon Yang Tinggi,**

**Jadilah Lumut Di Atas Bukit”**

**Persembahanku :**

* **Allah S.W.T. yang telah memberikan rahmat-Nya serta kesehatan sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini**
* **Ayahandaku Arwani dan Ibundaku Kasmawati yang tercinta yang selalu mendo’akanku**
* **Adik-adikku tercinta Mirnawati, Aziz Mu’azin (Nang) dan Lismawarni (Neng Lilis)**
* **Kekasih hatiku Titien “karut” yang selalu memberikan semangat untukku**
* **Sahabat-sahabatku yang super, Agamaku, Bangsaku dan Almamaterku yang kubanggakan.**

**KATA PENGANTAR**

*Alhamdulillahirabbil’alamin,* puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : “PERAN KOMITE MADRASAH DALAM PENERAPAN MANAJEMEN BERBASIS MADRASAH DI MTS N I MODEL PALEMBANG”. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat serta para pengikutnya hingga yaumil ahir.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Islam pada Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Dalam menyusun skripsi ini, penulis menyadari banyak menemui kesulitan-kesulitan, namun berkat bantuan berbagai pihak akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepad yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Aflatun Muchtar, M.A., selaku Rektor IAIN Raden Fatah Palembang.
2. Bapak Dr. Kasinyo Harto, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah Palembang.
3. Ibu Zuhdiyah, M. Ag., selaku pembimbing utama yang telah memberikan bimbingan, pemikiran serta motivasinya.
4. Bapak M. Hasbi, M. Ag., selaku pembibing kedua yang telah banyak memberikan bimbingan, koreksi dan motivasinya.
5. Para dosen di IAIN Raden Fatah Palembang yang telah memberikan ilmu kepada kami semua
6. Semua dosen yang ada di lingkuingan Jurusan Kapendidikan Islam yang telah mentransfer ilmu maupun motivasi yang tinggi kepada kami
7. Ayahanda Arwani dan Ibunda Kasmawati yang selalu menasehati dan mendo’akanku
8. Seluruh keluarga besar yang telah memberikan motivasi, bantuan serta do’a untuk mendukung keberhasilanku
9. Semua sahabatku yang selalu setia membantuku dalam penyelesaian skripsi ini.

Dengan iringan do’a semoga semua pihak yang terlibat dalam mensukseskan penelitian ini akan diberikan pahala yang setimpal di sisi Allah SWT. Akhirnya penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat konstruktif untuk penyempurnaan di masa yang akan datang, dan semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Rabbal ‘alamin.

Palembang, Juni 2012

Penulis

**ABSTRAK**

Dunia pendidikan di Indonesia sudah berkembang dengan pesat. Namun, sayangnya terkadang perkembangan tersebut tidak diikuti dengan peningkatan kualitas pendidikan yang sepadan. Untuk menghasilkan pendidikan yang berkualitas perlu adanya program pendidikan yang harus disiapkan secara baik, mengoptimalkan peran dari komite madrasah yang merupakan wadah dari aspirasi serta dukungan masyarakat dalam kebijakan serta program pendidikan sangat penting bagi perkembangan pendidikan di madrasah .

Kajian dalam penelitian ini adalah bagaimana peran komite madrasah di MTs N I Model Palemban, bagaimana peran komite madrasah dalam penerapan manajemen berbasis madrasah di MTs N I Model Palembang serta faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam penerapan manajemen berbasis madrasah di MTs N I Model Palembang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran komite madrasah di MTs N I Model Palembang, bagaimana peran komite madrasah dalam penerapan manajemen berbasis madrasah di MTs N I Model Palembang serta faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam penerapan manajemen berbasis madrasah di MTs N I Model Palembang. Intinya adalah mengetahui pelaksanaan tugas komite madrasah dalam memberdayakan masyarakat dan upaya madrasah dalam memberdayakan komite madrasah dalam memaksimalkan manajemen madrasah yang lebik baik.

Penelitian ini ­merupakan penelitian deskriptip dengan menggunakan data yang didapat melalui kepala madrasah, pengurus madrasah serta pengurus komite madrasah dengan menggunakan metode wawancara dan dokumen-dokumen MTs N I Model Palembang, kemudian data tersebut dianalisis dengan cara verifikasi data dan klasivikasi data sehingga memperoleh kesimpulan yang relevan dengan penelitian.

Adapun hasil penelitian yang diperoleh sebagai berikut :

1. Meskipun secara material tidak lagi mendukung yang mana akibat dari pendidikan gratis yang diterapkan pemerintah, namun peran dari komite madrasah di MTs N I Model Palembang tetap berjalan dengan baik sebagai mana perannya sebagai pendukung, pengontrol serta mediator dalam pendidikan di madrasah.
2. Penerapan manajemen berbasis madrasah yang merupakan ciri khas madrasah yang mandiri dengan memberdayakan peran komite madrasah, tenaga pendidik serta fasilitas yang baik untuk dipergunakan sebagai pendukung proses pembelajaran sehingga dapat berjalan dengan maksimal sesuai dengan tujuan dan harapan madrasah.
3. Beberapa fartor seperti ekonomi, kedisiplinan serta dukungan dari masyarakat dan orang tua adalah hal pendukung madrasah dalam memaksimalkan menejemen berbasis madrasah di MTs N I Model Palembang.

**DAFTAR ISI**

Halaman

HALAMAN JUDUL i

PENGANTAR SKRIPSI ii

PERSETUJUAN TIM PENGUJI iii

MOTTO iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI vi

ABSTRAK viii

**BAB I PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang Masalah 1
2. Identifikasi Masalah 10
3. Rumusan Masalah 11
4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 11
5. Definisi Operasional 12
6. Tinjauan Pustaka 13
7. Kerangka Teori 15
8. Metodologi Penelitian 19
9. Sistematika Pembahasan 24

**BAB II PELAKSANAAN TUGAS KOMITE MADRASAH DALAM PENERAPAN MBM**

1. Kondisi Pendidikan nasional 26
2. Pengertian Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) 29
3. Konsep Dasar Manajemen Berbasis Madrasah 34
4. Tujuan Dibentuknya Manajemen Berbasis Madrasah 36
5. Pengertian Komite Madrasah 39

**BAB III DESKRIPSI WILAYAH MTS N I MODEL PALEMBANG**

1. Sejarah Berdirinya MTs N I Model Palembang 44
2. Visi dan Misi Serta Tujuan Madrasah 45
3. Kondisi Objektif Madrasah 49
4. Struktur Organisasi Madrasah 51
5. Fasilitas Madrasah 53
6. Prosedur Pengelolaan dan Pemeliharaan Fasilitas Madrasah 54
7. Personil Madrasah 56

**BAB IV PERAN KOMITE MADRASAH DALAM PENERAPAN MANAJEMEN BERBASIS MADRASAH**

1. Peran Komite Madrasah di MTs N I Model Palembang 46
2. Peran Komite Madrasah Dalam Penerapan Manajemen Berbasis Madrasah di MTs N I Model Palembang 77
3. Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Manejemen Berbasis Madrasah di MTs N I Model Palkembang 80

**BAB V PENUTUP**

1. Kesimpulan 86
2. Saran-saran 87

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Selaku umat Islam, kita wajib menuntut ilmu pengetahuan dari mulai kita baru lahir bahkan sampai kita mati sekalipun kita wajib menuntut ilmu. Dijelaskan lagi di dalam sabda Rasulullah S.A.W:

**اُطْلُبِ الْعِلْمَ مِنَ الْمَهْدِ إِلَى اللَّحْدِ**

Artinya:

*“Tuntutlah ilmu dari ayunan sampai liang lahad”*.

Diera globalisasi sekarang ini, mayoritas manusia mengalami perubahan hampir pada semua aspek dan perkembangan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Dalam hal ini penomenanya adalah, manusia berpacu dalam mengembangkan pendidikan baik dibidang ilmu sosial, ilmu alam, ilmu pasti maupun ilmu-ilmu terapan lainnya. Namun bersamaan dengan itu, muncul sejumlah krisis berbangsa dan bernegara, misalnya krisis politik, ekonomi, sosial, hukum, etnis, agama, golongan dan ras. Maka dari itu, pola pendidikan yang diterapkan di sekolah haruslah sesuai dan lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat.

Pendidikan merupakan sebuah proses pengembangan diri (individu) dan kepribadian anak yang dilaksanakan secara sadar oleh pendidik dengan penuh tanggung jawab untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai sehingga mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan serta diharapkan dapat mencapai tujuan manusia yang sesungguhnya yakni sebagai insan kamil. Seperti yang tercantum dalam UU “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan mengembangkan watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan berkembangnya potensi anak didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.[[1]](#footnote-2)

Pelaksanaan pendidikan terutama di daerah tidak hanya diserahkan kepada kabupaten/kota, melainkan juga dalam beberapa hal telah diberikan kepada satuan pendidikan, baik pada jalur pendidikan sekolah maupun luar sekolah. Dengan kata lain, keberhasilan dalam penyelenggaraan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan juga pemerintah propinsi, kabupaten/kota, dan pihak sekolah, orang tua, dan masyarakat atau *stakeholder* pendidikan. Hal ini sesuai dengan konsep partisipasi berbasis masyarakat *(community-based* *participation)* dan manajemen berbasis sekolah *(school-based management)*, yang kini telah mulai dilaksanakan di Indonesia. Membangun sinergi antara pengelola pendidikan di madrasah, masyarakat sekitar madrasah, dan pemerintah dalam rangka mengembangkan kualitas madrasah secara aktif merupakan hal mutlak yang seharusnya dilakukan. Hal ini sesuai dengan perubahan paradigma sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi yang telah membuka peluang masyarakat untuk meningkatkan peran sertanya dalam wujud pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan demi kemajuan madrasah. Pada hakikatnya pendidikan itu adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, orang tua, dan masyarakat. Selaras dengan perkembangan tuntutan terhadap kualitas pelayanan dan hasil pendidikan, maka sudah selayaknya setiap komponen melakukan reposisi yang mengarah kepada aspirasi dan apresiasi dalam bentuk partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan madrasah yang berkualitas.

Kita ketahui bahwan Indonesia adalah Negara yang beragam, yang terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, kabupaten dan kota, kecamatan dan desa. Dan sesuai dengn pasal 11 UU No 22/1999 tentang otronomi daerah yang berkaitan dengan kewenangan daerah mencakup semua bidang pemerintahan, yakni pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertahanan, koperasi serta tenaga kerja.[[2]](#footnote-3)

Otonomi pendidikan ini dapat diartikan sebagai kewenangan atau kemandirian, yaitu kemandirian madrasah dalam mengatur dirinya sendiri dan tidak bergantung pada yang lain. Berkenaan dengan ini, yang dimaksud dengan otonomi sekolah adalah kewenangan sekolah untuk mengatur dan mengurus kepentingan warga sekolah menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi warga sekolah sesuai peraturan perundang-undangan pendidikan nasional yang berlaku.[[3]](#footnote-4)

Madrasah adalah sebuah pranata sosial yang bersistem, terdiri atas komponen-komponen yang saling terkait dan saling mempengaruhi. Komponen utama madrasah atau sekolah adalah siswa, pendidik dan tenaga kependidikan lainnya, kurikulum, serta fasilitas pendidikan. Selain itu, pemangku kepentingan (stakeholder) juga mempunyai pengaruh yang besar terhadap proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan. Dalam hal ini orang tua dan masyarakat merupakan pemangku kepentingan yang harus dapat bekerja sama secara sinergis dengan sekolah. Dari berbagai pengamatan dan analisis, sedikitnya ada tiga indikator yang menyebabkan mutu pendidikan tidak mengalami peningkatan secara merata. *Faktor pertama*, kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional menggunakan pendekatan *education production function* atau *input-output* *analysis* yang tidak dilaksanakan secara konsekuen. Pendekatan ini melihat bahwa lembaga pendidikan berfungsi sebagai pusat produksi yang apabila dipenuhi semua *input* yang diperlukan dalam kegiatan produksi tersebut, maka lembaga ini akan menghasilkan output yang dikehendaki. Pendekatan ini menganggap bahwa apabila input pendidikan seperti pelatihan guru, pengadaan buku dan alat pelajaran, dan perbaikan sarana serta prasarana pendidikan lainnya dipenuhi, maka mutu pendidikan (*output*) secara otomatis akan terjadi. Akan tetapi dalam kenyataanya, mutu pendidikan yang diharapkan tidak terjadi. Karena selama ini dalam menerapkan pendekatan *education production function* terlalu memusatkan pada input pendidikan dan kurang memperhatikan pada proses pendidikan, padahal proses pendidikan sangat menentukan output pendidikan. *Faktor kedua*, penyelenggaraan pendidikan nasional dilakukan secara birokratik-sentralistik sehingga menempatkan madrasah sebagai penyelenggaraan pendidikan sangat tergantung pada keputusan birokrasi yang mempunyai jalur yang sangat panjang dan kadang-kadang kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kondisi sekolah setempat. Sekolah/madrasah lebih menjadi subordinasi dari birokrasi diatasnya sehingga mereka kehilangan kemandirian, keluwesan, motivasi, kreativitas dan inisiatif untuk mengembangkan dan memajukan lembaganya termasuk peningkatan mutu pendidikan sebagai salah satu tujuan pendidikan nasional. *Faktor ketiga*, peran serta warga madrasah khususnya guru dan peran serta masyarakat, orangtua siswa pada umumnya, dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini sangat minim. Partisipasi guru dalam pengambilan keputusan sering diabaikan, padahal terjadi atau tidaknya perubahan di madrasah sangat tergantung pada guru. Dikenalkan pembaharuan apapun jika guru tidak berubah, maka tidak akan terjadi perubahan di madrasah tersebut. Partisipasi masyarakat selama ini pada umumnya sebatas pada dukungan dana, sedang dukungan-dukungan lain seperti pemikiran, moral, dan barang/jasa kurang diperhatikan. Akuntabilitas madrasah terhadap masyarakat juga lemah. Madrasah tidak mempunyai beban untuk bertanggung jawab atas hasil pelaksanaan pendidikan kepada masyarakat, khususnya orang tua siswa, sebagai salah satu unsur utama yang berkepentingan dengan pendidikan *(stakeholder)*.[[4]](#footnote-5)

Lahirnya Kepmendiknas tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah sesungguhnya tidak terlepas dari perubahan paradigma pelaksanaan urusan pemerintahan di negeri ini sejak kelahiran UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Hampir semua urusan pemerintahan di negeri ini telah diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah kabupaten/kota, kecuali tiga urusan, yakni urusan politik luar negeri, keuangan, dan agama.

Sejak tahun 2002, secara resmi konsep Komite Sekolah digulirkan oleh menteri pendidikan nasional. Sebagaimana telah kita ketahui, proses kelahiran Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah adalah Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Salah satu landasan hukum yang melahirkan Kepmendiknas tersebut antara lain adalah UU Nomor 25 Tahun 2000  tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2001 – 2005. Bab VII tentang Pendidikan dalam UU tersebut, antara lain mengamanatkan bahwa untuk melaksanakan desentralisasi bidang pendidikan perlu dibentuk ”dewan sekolah” di setiap kabupaten/kota, yang kemudian lebih dikenal dengan nama generik ”dewan pendidikan”. Kemudian di setiap satuan pendidikan dibentuk “komite sekolah/madrasah”.[[5]](#footnote-6)

Komite madrasah merupakan nama baru pengganti Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3). Secara substansi kedua istilah tersebut tidak begitu mengalami perbedaan, yang membedakan hanya terletak pada pengoptimalan peran serta masyarakat dalam mendukung dan mewujudkan mutu pendidikan. Selain itu, komite madrasah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan di luar sekolah.

Tujuan pembentukan Komite Madrasah adalah:

1. Mewadahi dan menyalurkan aspirassi serta prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan
2. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan
3. Menciptakan suasana dan kondisi trasparan, akuntabel dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.[[6]](#footnote-7)

Kerjasama  lembaga pendidikan dengan komite madrasah  merupakan bukti kepedulian dan tanggung jawab mereka tehadap dunia pendidikan. Para orang tua telah menitipkan anak mereka pada lembaga agar diajar dan dididik oleh guru, sehingga anak-anak mereka kelak menjadi anak yang sholeh/sholehah. Setelah dititipkan, anak-anak tersebut menjadi tanggung-jawab guru sepenuhnya di sekolah. Sedangkan oang tua sebagai wali murid berkewajiban memenuhi segala keperluan anaknya yang berhubungan dengan pendididkan mereka, seperti : memberikan seragam sekolah, membelikan alat tulis, membayar uang sekolah dan lain-lain. Sebagai wujud kerjasamanya, bahkan tidak sedikit orang tua / wali murid yang turut ambil bagian dalam pembangunan suatu sekolah atau Madrasah di mana anak-anak merka menuntut ilmu. Dengan niat jihad fisabilillah dan demi pendiddikan anak-anak mereka dan demi masa depan bangsa dan agama, baik dengan harta, serta dengan akal pikiran dan ide-ide mereka. Dengan adanya kerja sama seperti ini maka hubungan madrasah  dengan komite madrasah tetap terjaga.

Manajemen Berbasis Madrasah dipandang sebagai alternatif dari pola umum pengoperasian sekolah yang selama ini memusatkan wewenang di kantor pusat dan daerah. Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) adalah strategi untuk meningkatkan pendidikan dengan mendelegasikan kewenangan pengambilan keputusan penting dari pusat dan dearah ke tingkat sekolah. Dengan demikian, Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) pada dasarnya merupakan sistem manajemen di mana madrasah merupakan unit pengambilan keputusan penting tentang penyelenggaraan pendidikan secara mandiri.

Madrasah Tsanawiyah Negeri I Model Palembang adalah salah satu madrasah yang menggunakan pola pendidikan yang berbasis MBM (Manajemen Berbasis Madrasah). Hasil observasi awal penulis yang dilakukan pada pertengahan bulan Desember mengatakan bahwa MTs Negeri I Model Palembang ini mempunya sistem pendidikan yang baik dengan pengembangan pengajaran dan pembelajaran yang disesuaikan dengan kepentingan dan kebutuhan sekolah dan lingkungan masyarakat yang sesuai dengan inti dari pengembangan Manajemen Berbasis Madrasah atau Sekolah (MBM/MBS), sehingga nantinya akan menghasilkan atau output siswa yang berkualitas dan mampu bersaing dalam dunia pendidikan di era modern.

*Madrasah Based managemen* atau Manajemen Berbasis Madrasah adalah strategi untuk mewujudkan madrasah yang efektif dan produktif. Manajemen Berbasis Madrasah merupakan paradikma baru dalam manajemen pendidikan yang memberikan otonomi luas pada madrasah yang melibatkan masyarakat dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. Otonomi ini diberikan supaya madrasah leluasa mengelola sumber daya, sumber dana sumber belajar dan kebutuhan sesuai dengan kebutuhan setempat.[[7]](#footnote-8)

Scanlan dan Key mendefenisikan manajemen sebagai proses pengkoordinasian dan pengintegrasian semua sumberdaya tekhnikal lain untuk mencapai aneka tujuan khusus yang ditetapkan. Dan banyak arti orang mengartikan MBM, seperti yang disampaikan oleh Larry Kuehn:

1. Manajemen lokal madrasah/sekolah. Maksudnya, sekolah memiliki otonomi pengelolaan pada tingkat madrasah/sekolah.
2. Pembagian kewenangan dalam pembuatan keputusan (Dinas Diknas melimpahkan sebagian kewenangannya selama ini ketingkat sekolah, baik secara langsunbg ataupun melalui komite madrasah/sekolah.
3. Sekolah atau madrasah memiliki kewenangan mengelola diri dalam lingkungan yang cukup luas untuk menyusun perencanaan, program, penganggaran dan implementasi.
4. Sekolah dengan penentuan pengelolaan secara mandiri. Maksudnya adalah sekolah memiliki kewenangan untuk mengurus dirinya sendiri, misalnya yang berkenaan dengan program keunggulan, menentukan besarnya pembiayaan, mengatur program sekolah, dan lain sebagainya.
5. Madrasah/Sekolah berbasis penentuan “nasib” sendiri.
6. Devolsi. Maksudnya, pengelolaan sekolah atau madrasah yang tidak bergantung dengan yang lain, yakni kemandirian tertentu sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan komunitas madrasah/sekolah dan masyarakat.[[8]](#footnote-9)

Karakteristik yang paling menonjol dalam konsep manajemen berbasis madrasah (MBM) adalah pemberdayaan partisipasi para orangtua dan masyarakat. Sekolah memiliki fungsi subsider, fungsi primer pendidikan ada pada orangtua. Menurut Cheng (1989) ada dua bentuk pendekatan untuk mengajak orang tua dan masyarakat berpartisipasi aktif dalam pendidikan.

* 1. Pendekatan *school base,d* yaitu dengan cara mengajak orang tua siswa datang ke madrasah/sekolah melalui pertemuan-pertemuan, konferensi, diskusi guru orang tua dan mengunjungi anaknya yang sedang belajar di madrasah/sekolah.
  2. Pendekatan *home based*, yaitu orang tua membantu anaknya belajar di rumah dan guru berkunjung ke rumah. Sedangkan, peran masyarakat bukan hanya dukungan finansial, tetapi juga dengan menjaga dan menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan tertib serta menjalankan kontrol sosial di sekolah. Peran tokoh-tokoh masyarakat dengan jalan menjadi penggerak, informan dan penghubung, koordinator dan pengusul.

1. **Identifikasi Masalah**

Beranjak dari latar belakang masalah di atas, dalam hal ini penulis mengemukakan beberapa identifikasi masalah, beberapa masalah tersebut sebagai berikut:

* 1. Kurangnya pasilitas pendukung dalam menunjang pembelajaran
  2. Kurangnya tenaga profesional pengajar di sekolah tersebut.
  3. Pentingnya diterapkan Manajemen Berbasis Madrasah yang tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan prosedur kebijakan madrasah.
  4. Kurangnya komunikasi dan interaksi kepala madrasah dengan guru dan orang tua/wali siswa.

1. **Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

* 1. Bagaimana peran Komite Madrasah di MTs N I Model Palembang?
  2. Bagaimana peran Komite Madrasah dalam penerapan Manajemen Berbasis Madrasah di MTs N I Model Palembang?
  3. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat komite madrasah dalam penerapan Manajemen Berbasis Madrasah di MTs N I Model Palembang?

1. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini akan penulis uraikan satu persatu, tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

* + - * 1. Untuk mengetahui Peran Komite Madrasah di MTs Negeri I Model Palembang
        2. Untuk mengetahui Peran Komite Madrasah dalam penerapan Manajemen Berbasis Madrasah di MTs N I Model Palembang
        3. Untuk mengetahui Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat komite madrasah dalam penerapan Manajemen Berbasis Madrasah di MTs N I Model Palembang

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Dapat digunakan sebagai referensi bagi seluruh komponen penddikan, diantaranya kepala sekolah, guru, komite sekolah, orang tua, dan Dinas Pendidikan.
2. Sebagai kerangka acuan model pengembangan sekolah, khususnya di MTs N I Model Palembang
3. Dapat dijadikan sebagai masukan bagi pengelola madrasah dan pemerintah.
4. **Defenisi** **Operasional**
   1. Peran komite madrasah

Di dalam KKBI disebutkan bahwa peran berarti bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.[[9]](#footnote-10) Adapun komite madrasah merupakan nama baru pengganti Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3) yang berperan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

Dengan demikian peran komite madrasah dalam kontek pendidikan adalah, bagaimana tanggung jawab yang dilakukan oleh komite madrasah dalam peningkatan mutu pelayanan yang diaplikasikan dalam bentuk mengarahkan, memberikan pertimbangan serta dukungan, baik tenaga maupun finansial terhadap madrasah.

Adapun Indikator dari peran komite madrasah diantaranya sebagai berikut:

1. Pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan
2. Pendukung baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan  di satuan pendidikan
3. Pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan
   1. Penerapan MBM

Kata penerapan berasal dari kata terap dalam bahasa Indonesia yang berarti mengenakan, memperaktikkan.[[10]](#footnote-11)

Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) merupakan paradikma baru dalam manajemen pendidikan yang memberikan otonomi luas pada madrasah yang melibatkan masyarakat dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. Otanomi ini dapat diartikan sebagai sistem pengelolaan yang berasaskan kemandirian madrasah dalam mengelola sumber daya, sumber dana sumber belajar dan kebutuhan sesuai dengan kebutuhan.

Dengan demikian, komite madrasah diharapkan mampu dijalankan dengan baik sehingga menjadi salah satu faktor yang sangat mendukung dalam kemajuan madrasah.

1. **Tinjauan Pustaka**

Berikut ini akan dikemukakan berbagai tinjauan kepustakaan atau tinjauan penelitian yang relevan untuk digunakan sebagai tinjauaan dalam penelitian ini:

Penelitian yang pertama disampaikan oleh Dian Cahyani Fitri dalam penelitiannya yang berjudul *Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Palembang* menyatakan bahwa kendala-kendala dalam penerapan Manajemen Berbasis Madrasah yakni sebagian orang tua belum memberikan kontribusi maksimal, masyarakat/warga sekolah juga belum mendukung secara maksimal sehingga penerapan Manajemen Berbasis Madrasah itu sendiri sedikit mengalami keterhambatan, akan tetapi diusahakan agar seluruh pengelola bekerja sama dalam menjalankan penerapan manajemen berbasis madrasah guna meningkatkan mutu pendidikan.[[11]](#footnote-12)

Tinjauan yang kedua, Manzor Jamil dalam tulisannya yang berjudul *Otonomisasi Madrasah dalam Perspektif Manajemen Berbasis Madrasah (MBM)* menyimpulkan bahwa manajemen berbasis madrasah digunakan sebagai strategi untuk mewujudkan perbaikan dan peningkatan pendidikan di madrasah agar lebih efektif, efesien, serta produktif dengan memberikan otonomisasi yang luas kepada madrasah, serta melibatkan masyarakat dalam kerangka kebijakan pendidikan Nasional. Dari konsep ini terdapat adanya penekanan terhadap pengembangan prinsip-prinsip otonomi pendidkan dalam konsep Manajemen Berbasis Madrasah yang bertujuan untuk mendorong adanya upaya-upaya inovatif bagi system pendidikan madrasah yang sesuai dan relevan terhadap aspirasi dan kebutuhan peserta didik, masyarakat (orang tua) dan pemerintah.[[12]](#footnote-13)

Secara garis besar terdapat kesamaan antara beberapa tinjauan di atas dan yang penulis teliti, hanya saja penulis lebih menekankan pada Peran Komite Madrasah Terhadap Penerapan Manajemen Berbasis Madrasah di MTs N I Model Palembang dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut pada madrasah tersebut.

1. **Kerangka Teori**

Kerangka teori adalah merupakan uraian singkat tentang teori yang dipakai dalam penelitian menjawab pertanyaan penelitian. [[13]](#footnote-14) Kerangka teori yang penulis jadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan penelitian adalah:

1. Peran Komite Madrasah

Sebelum terbentuknya komite sekolah, BP3 yang tugasnya adalah membantu sekolah agar proses belajar siswa menjadi lebih lancer, terutama yang berkaitan dan yang dapat dikaitkan dengan masyarakat. Namun kegiatan badan ini sebagian besar baru pada usaha pengumpulan dana dan mewujudkan dana menjadi barang-barang atau bangunan untuk keperluan sekolah.[[14]](#footnote-15)

Pada saat ini, keberadaan komite madrasah/komite sekolah dalam dunia pendidikan harus bertumpu pada landasan partisifasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas dan hasil pendidikan di sekolah atau madrasah. Dari itu, dalam pembentukannya harus memperhatikan berbagai perannya seperti:

1. Sebagai pemberi pertimbangan *(advisory agency)* dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan.
2. Sebagai pendukung *(supporting agency)*  baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan.
3. Sebagai Pengontrol *(controlling agency)* dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan pengeluaran di satuan pendidikan.
4. Sebagai mediator antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Daerah dengan masyarakat.[[15]](#footnote-16)
5. Tujuan Dibertuknya Komite Madrasah
   * + 1. Mewadahi dan menyalurkan aspirassi serta prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan
       2. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan
       3. Menciptakan suasana dan kondisi trasparan, akuntabel dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.[[16]](#footnote-17)

Untuk menjalankan peran yang telah disebutkan di atas, komite sekolah memiliki fungsi sebagaiberikut:

1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikanyangbermutu
2. Melakukan kerjasama dengan masyarakat (Perorangan/organisasi/dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dan pemerintah yang berkenaan dengan penyelengaraan pendidikan bermutu
3. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat
4. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai:
5. Kebijakan dan program pendidikan
6. Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS)
7. Kriteria kinerja satuan pendidikan
8. Kriteria tenaga kependidikan
9. Kriteria fasilitas pendidikan
10. Mendorong orang tua siswa dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu pendidikan dan pemerataan pendidikan
11. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelengaraan pendidikan di satuan pendidikan
12. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.[[17]](#footnote-18)
13. Manajemen Berbasis Madrasah

Manajemen berbasis madrasah (MBM) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai keunggulan masyarakat bangsa dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan cara pemberian otonomi pendidikan yang luas kepada sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan secara umum.

Karakteristik manajemen berbasis madrasah (MBM) dapat diketahui antara lain dari bagaimana madrasah mengoptimalkan kinerjanya, proses pembelajaran, pengelolaan sumber belajar, profesionalisme tenaga kependidikan, serta sistem administrasi secara keseluruhan. Dari berbagai sumber, ada beberapa karakteristik dasar manajemen berbasis madrasah (MBM) sebagai berikut:

1. Pemberian Otonomi Luas Kepada Madrasah
2. Tingginya Partisipasi Masyarakat dan Orang Tua
3. Kepemimpinan Yang Demokratis dan Professional
4. Kinerja Team Yang Kompak

Pemerintah memberikan otonomi luas kepada madrasah yang disertai dengan tanggung jawab untuk mengelola sumber daya dan pengembangan strategi sesuai dengan kondisi setempat. Sekolah atau madrasah juga diberi kewenangan untuk mengembangkan program kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan kondisi peserta didik serta tuntutan masyarakat. Selain itu juga yang berkaitan dengan menggali dan mengelola sumber dana sesuai dengan prioritas kebutuhan.[[18]](#footnote-19)

1. **Metodologi Penelitian**

Dalam penelitian ini, ada beberapa tekhnik yang penulis lakukan dalam mengumpulkan data yang akan diambil yaitu:

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang mana penelitiannya dilakukan dengan menjelaskan, menggambarkan, dan menguraikan pokok permasalahan yang hendak dibahas dalam penelitian ini dan kemudian ditarik kesimpulandari penelitian tersebut.[[19]](#footnote-20) Jadi intinya adalah data kualitatif tidak memakai angka tapi nerupa penjabaran di dalam kalimat.

1. Jenis dan Sumber Data
   * + - 1. Jenis Data

Penelitian yang penulis lakukan adalah menggunakan data kualitatif. Data kualitatif adalah data berupa kalimat tentang peran komite madrasah dalam penerapan manajemen berbasis madrasah di MTs Negeri I Model Palembang, yang dikumpulkan dalam wawancara terhadap informan yang sudah peneliti tentukan.

* + - * 1. Sumber Data

Adapun sumber data yang diambil penulis dari madrasah yaitu berupa keterangan dari kepala madrasah, dokumen madrasah dan beberapa dewan guru serta dokumen komite madrasah.

* + - * 1. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, informan penelitiannya adalah kepala madrasah dan ketua komite madrasah serta anggota komite lainnya.

1. Tekhnik Pengumpulan Data

Adapun yang penulis lakukan dalam tekhnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, ada beberapa tekhnik yang digunakan, diantaranya adalah:

1. Observasi

Observasi ini adalah melihat serta mendengar informasi yang dianggap perlu guna dijadikan bahan acuan dalam penelitian.

Adapun hal-hal yang diobservasi dalam penelitian ini adalah tentang peran dari komite madrasah dan penerapan manajemen berbasis madrasah di MTs N I Model Palembang serta penerapan manajemen berbasis madrasah di MTs N I Model Palembang.

1. Wawancara

Wawancara secara umum adalah Tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Tekhnik wawancara ini digunakan untuk memperoleh data dari orang-orang yang diperlukan keterangannya tentang komite sekolah dan penerapan MBM di MTs N I Model Palembang seperti kepala sekolah, para karyawan tenaga pendidik (guru), dan siswa.

Wawancara ini ditujukan kepada kepala madrasah dan pengurus komite madrasah untuk memperoleh data tentang komite madrasah dan perannya dalam kemandirian madrasah. Cara yang dilakukan dalam wawancara ini adalah dengan cara menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan dipertanyakan atau biasa disebut dengan wawancara terstruktur.

1. Dokumuentasi

Metode dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui data yang tertulis seperti arsip-arsip, buku dan lain-lain. Dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data tentang jumlah guru, jumlah sisiwa, sarana dan prasarana sebagai penunjang pembelajaran serta data lain yang dianggap perlu dalam penelitian.

Adapun dokumen yang dijadikan landasan dalam pengambilan data ini bersumber dari dokumen sekolah yang berisikan tentang sejarah berdirinya MTs Negeri I Model Palembang, Letak geografis, Keadaan guru dan karyawan, Struktur organsisasi, Latar belakang pendidikan guru dan karyawan, serta berbagai sarana dan prasarana di di MTs Negeri I Model Palembang

1. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah sebuah proses menganalisa data yang didapat sehingga dapat diambil kesimpulan benar atau salah hasil penelitian itu dengan kenyataan yang ada. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Verifikasi

Dalam kamus ilmiah populer verifikasi adalah pemeriksaan kebenaran laporan, pernyataan.[[20]](#footnote-21) Sedangkan dalam pengertian yang sesungguhnya verifikasi adalah tahapan pengujian atau pemeriksaan kembali suatu penemuan atau hasil data yang didapat melalui pengamatan dan penetapan dengan cara mengukur, menguji dan membandingkan antara data yang didapat dengan keadaan yang sebenarnya dilapangan.[[21]](#footnote-22)

Dengan demikian verifikasi dapat memberikan sebuah kesimpulan dari sebuah data yang sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan yang merupakan penarikan kesimpulan yang muncul dari data yang harus diuji kebenarannya (pembuktian kebenarannya), kekokohannya, dan kecocokannya yaitu merupakan validitas. Dengan kata lain, data yang telah di dapat dari informan akan diuji kebenarannya, kekokohannya, kecocokannya apakah valid atau tidak dengan yang ada sebenarnya sehingga data dapat digunakan oleh peneliti.

1. Klasifikasi

Klasifikasi merupakan kata serapan dari bahasa Belanda, *classificatie* berarti sebuah metode untuk menyusun data secara sistematis atau menurut beberapa aturan atau kaidah yang telah ditetapkan.[[22]](#footnote-23) Towa P. Hamakonda dan J. N. B. mengatakan bahwa klasifikasi adalah pengelompokan yang sistematis daripada sejumlah objek, gagasan, buku atau benda-benda lain ke dalam kelas atau golongan tertentu berdasarkan ciri-ciri yang sama.[[23]](#footnote-24) Sedangkan didalam kamus ilmiah popular klasifikasi adalah pengelompokan, pembedaan berdasarkan jenis.[[24]](#footnote-25) Maksudnya data yang telah di dapatkan maka dikelompokkan sesuai dengan dengan data yang diinginkan.

Jadi berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan klasifikasikan adalah metode untuk menyusun data secara sistematis dengan cara mengelompokkan sejumlah data berdasarkan ciri-ciri atau jenis yang sama dengan petunjuk yang telah ditentukan atau ditetapkan.

1. Triagulasi

Triangulasi ini merupakan suatu cara memandang permasalahan atau objek yang di evaluasi dari berbagai sudut pandang, bisa dipandang dari banyaknya metode yang dipakai atau sumber data, tujuannya agar dapat melihat objek yang dievaluasi dari berbagai sisi, trianguasi dilakukan untuk mengejar atau mengetahui kualitas data yang di pertanggung jawabkan.[[25]](#footnote-26)

Pengertian lain mengatakan definisi Triangulasi yaitu teknik pemeriksaam keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan data yang telah diperoleh. Hal ini peneliti lakukan dengan cara:

1. membandingkkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. Hasil pengamatan di lapangan, peneliti bandingkan dengan berbagai hasil wawancara dengan kepala sekolah. Sehingga diketahui bahwa data yang diperoleh adalah sah
2. membandingkan keadaan dan prspektif seseorang yang berbagi pendapat dan pandangan kepala sekolah yang ada di sekolah itu. Hal ini peneliti lakukan dengan membandingkan berbagai pendapat kepala sekolah berkaitan dengan fokus penelitian,
3. membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen. Hal ini peneliti lakukan dengan mengamati latar belakang kepala sekolah, baik dari ijasah maupun bidang yang mereka duduki sekarang, dengan bagaimana cara pihak sekolah melakukan penerapan manajemen berbasis sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan.
4. **Sistematika Pembahasan**

Adapun yang penulis sampaikan dalam sistematika pembahasan ini adalah sebagai berikut:

Bab 1. Pendahuluan, yang mana pada bab ini berisikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, defenisi operasional, kerangka teori, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II. Deskripasi objek dan wilayah penelitan, yang berisikan tentang: histori dan geografis, letak dan sejarah sekolah, struktur dan pola organisasi, sarana dan prasarana, serta proses pembelajaran dan kurikulum yang diterapkan di MTs N I Model Palembang.

Bab III. Landasan teori, yang meliputi : Pengertian komite sekolah, pengertian madrasah, pengertian manajemen, konsep dasar Manajemen Berbasis Madrasah, tujuan dan manfaat Manajemen Berbasis Madrasah (MBM).

Bab IV. Analisa data, yang berisikan data yang berkaitan dengan persoalan pokok yang dikaji dan diteliti.

Bab V. Penutup, pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

**BAB II**

**PELAKSANAAN TUGAS KOMITE MADRASAH**

**DALAM PENERAPAN MBM**

1. **Kondisi Pendidikan Nasional**

Sejumlah krisis yang dialami bangsa Indonesia telah membawa kepada keterpurukan mutu kehidupan berbangsa. Keterpurukan tersebut diindikasikan oleh merosotnya mutu sumberdaya manusia Indonesia. Rendahnya mutu sumber daya manusia (SDM) tersebut menggambarkan rendahnya mutu sistem pendidikan yang belum mampu melahirkan manusia Indonesia yang handal, berakhlak mulia, yang mampu bekerja sama dan bersaing di era globalisasi, sehingga peringkat sumber daya manusia (SDM) Indonesia tidak hanya terpuruk ditingkat dunia, tapi bahkan di tingkat Asia Tenggara.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan prasyarat mutlak untuk mencapai tujuan pembangunan. Dengan mengutip pernyataan Tilaar[[26]](#footnote-27), yang menegaskan bahwa “pendidikan merupakan alternatif strategis dalam membangun suatu masyarakat Indonesia yang sejahtera dan demokratis”. Lebih lanjut Tilaar[[27]](#footnote-28) mengemukakan bahwa “cita-cita tersebut hanya mungkin diwujudkan melalui proses pendidikan”.

Dengan demikian gagasan mengenai reformasi pendidikan di Indonesia menjadi sangat relevan, terutama dalam konteks penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas yang harus dimulai dengan perbaikan pendidikan pada semua jenjang dan jalur, dengan perbaikan secara komprehensif meliputi perbaikan perencanaan, proses pembelajaran, serta perbaikan manajemennya, yang semua itu perlu dilakukan untuk mencapai perbaikan pada hasil pendidikan. Outputpendidikan kedepan harus siap berkompetensi dalam memasuki pasar tenaga kerja, memiliki wawasan global, menguasai keterampilan te

khnologi modern, serta memiliki basis keahlian yang sesuai dengan kebutuhan pasar.

Kemudian mengutip analisis Blondel sebagaimana dikemukakan oleh Dede Rosyada, “bila dilihat dari kerangka perkembangan dunia memasuki abad ke-21 ini, semua peduduk dunia menghadapi persoalan yang sama yang mengkerucut pada tiga persoalan besar, yaitu persoalan kependudukan, interdepensi Negara dengan dunia usaha, serta kemajuan sains dan teknologi”. [[28]](#footnote-29)

Masalah kependudukan antara lain ledakan penduduk dunia dan telah menimbulkan persoalan baru yakni kemampuan sektor jasa dalam menyerap tenaga kerja. Kemudian ketergantungan Negara dengan Negara lain sangat kuat, terutama setelah berkembangnya keterbukaan ekonomi dunia dan berkembangnya sistem ekonomi liberal sehingga ketergantungan politik, ekonomi, dan berbagai aktifitas kultural tidak dapat dielakkan. Persoalan lain adalah berkembangnya sains dan temuan-temuan teknologi baru yang seringkali menimbulkan perdebatan.

Pandangan dan analisa di atas setidaknya merefleksikan beberapa faktor penting yang mendasari pentingnya reformasi dalam dunia pendidikan kita, yaitu kegagalan pendidikan yang telah dilalui dengan indikator rendahnya kualitas rata-rata hasil belajar siswa, dan perkembangan perekonomian dunia yang membuka akses pasar global, yang semua itu merupakan peluang sekaligus tantangan yang harus dihadapi dengan kesiapan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang kompetitif.

Sebagai wujud dari realisasi dari reformasi pendidikan yang sedang kita jalani saat ini, lahirlah berbagai kebijakan yang tentunya dapat membawa perubahan dalam berbagai bidang kehidupan. Diantara perubahan tersebut adalah lahirnya UU No 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah dan UU No 20 tantang Sisdiknas. Dengan kerangka otonomi, kesempatan diberikan seluas-luasnya kepada daerah dalam mengembangkan potensi daerahnya, termasuk didalamnya sektor pendidikan. Untuk merealisasikan hal inilah maka infrastruktur berbagai aturan hukum telah dipersiapkan dan diundangkan UU SISDIKNAS yang berbasis pola pendidikan demokratis serta didukung pula oleh UU No 20 Tahun 1999 tentang otonomi daerah, yang meletakkan sektor pendidikan sebagai salah satu sektor yang diotonomisasikan, yang implementasinya akan lebih banyak didorong ke madrasah atau sekolah bersama komponen-komponen terkait.

1. **Pengertian Manajemen Berbasis Madrasah (MBM)**
2. PengertianManajemen

Banyak pegertian yang diberikan mengenai kata manajemen, antara lain pengertiaanya adalah kegiatan menganalisis, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program-program yang dibuat untuk membentuk, membangun, dan memelihara untuk mencapai tujuan dari organisasi.[[29]](#footnote-30)

Istilah manajemen juga sering kali diartikan sebagai proses pencapaian hasil melalui dan dengan orang lain dengan memaksimumkan pendayagunaan sumberdaya yang tersedia.[[30]](#footnote-31)

Kalau ditinjau dari segi bahasa, manajemenmerupakan terjememahan secara langsung dari kata *manajemen* yang artinya adalah pengelolaan, ketatalaksanaan, atau tata pemimpin. Dan kata *Manajemen*  berakar dari kata kerja  *to manage* yang berarti mengurus, mengatur, melaksanakan atau mengelola.[[31]](#footnote-32)

Dari banyaknya pengertian manajemen di atas, dapat dipahami bahwa, manajemen itu adalah sebuah proses penganalisisan, perencanaan dan pelaksanaan, supaya dapat tercapainya tujuan secara maksimal dari sebuah kegiatan. Jadi, sangat penting sekali sebuah manajemen yang baik dalam sebuah organisasi atau lembaga pendidikan, karma manajemen yang baik adalah salah satu kunci majunya sebuah organisasi atau sebuah lembaga pendidikan.

1. PengertianManajemenBerbasisMadrasah/Sekolah

Istilah Manajemen berbasis Sekolah merupakan terjemahan dari *.School Based Management..* Istilah ini pertama kali muncul di Amerika Serikat ketika masyarakatmulai mempertanyakan relevansi pendidikan dengan tuntutan dan perkembanganmasyarakat setempat.[[32]](#footnote-33)

Manajemen berbasis madrasah/sekolah (MBS/MBM) adalah model manajemen madrasah yang memberikan otonomi kepada kepala madrasah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan (*stake holder*) yang dilayani.[[33]](#footnote-34)

Sangat banyak para ahli dan pakar pendidikan yang mengartikannya tentang pengertian dari Manajemen Berbasis Masdrasah (MBM), seperti yang disampaikan oleh beberapa pakar pendidikan berikuty ini:

**Menurut E. Mulyasa,** Pengertian Manajemen berbasis Sekolah (MBS) merupakan salah satu wujud dari reformasipendidikan yang menawarkan kepada sekolah untuk menyediakan pendidikan yanglebih baik dan memadai bagi para peserta didik. Otonomi dalam manajemenmerupakan potensi bagi sekolah untuk meningkatkan kinerja para staff, menawarkanpartisipasi langsung kelompok-kelompok yang terkait, dan meningkatkanpemahaman masyarakat terhadap pendidikan.[[34]](#footnote-35)

**Menurut Nanang Fatah**, Manajemen Berbasis Sekolah merupakan pendekatan politik yang bertujuan untuk mendesain ulang pengelolaan sekolah dengan memberikan kekuasaan kepada kepala sekolah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya perbaikan kinerja sekolah yang mencakup guru, siswa, komite sekolah, orang tua siswa dan masyarakat. Manajemen berbasis Sekolah mengubah sistem pengambilan keputusan dengan memindahkan otoritas dalam pengambilan keputusan dan manajemen ke setiap yang berkepentingan di tingkat lokal.[[35]](#footnote-36)

Disamping itu **Larry Kuehn** mengemukakan bahwa, Ada 6 inti dari arti Manajemen Berbasis Madrasah/Sekolah (MBM/S) yaitu:

1. Manajemen lokal madrasah/sekolah. Maksudnya, madrasah memiliki otonomi pengelolaan pada tingkat sekolah atau komplek madrasah
2. Pembagian kewenangan dalam pembuatan keputusan. Maksudnya adalah, Diknas melimpahkan sebagian kewenangannya selama ini ketingkat madrasah, baik secara langsung ataupun melalui komite madrasah.
3. Madrasah/Sekolah memiliki kewenangan mengelola diri dalam lingkungan yang cukup luas untuk menyusun perencanaan, program, penganggaran dan implementasi.
4. Madrasah/Sekolah dengan penentuan pengelolaan secara mandiri. Maksudnya adalah sekolah memiliki kewenangan untuk mengurus dirinya sendiri, misalnya yang berkenaan dengan program keunggulan, menentukan besarnya pembiayaan, mengatur program madrasah/sekolah, dan lain sebagainya
5. Sekolah berbasis penentuan “nasib” sendiri
6. Devolusi. Maksudnya, pengelolaan madrasah/sekolah yang tidak bergantung dengan yang lain, yakni kemandirian tertentu sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan komunitas madrasah/sekolah dan masyarakat.[[36]](#footnote-37)

Merujuk pada beberapa pengertian di atas, Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) dapat didefinisikan sebagai suatu proses kerja komunitas madrasah dengan cara yang baik dengan menerapkan kaidah-kaidah otonomi, akuntabilitas, partisipasi, dan sustainabilitas untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan dan pembelajaran secara bermutu.

Melalui Manajemen Berbasis Madrasah/Manajemen Berbasis Sekolah, yang mana MBM/MBS suatu instansi sekolah atau madrasah memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan yang terkait langsung dengan kebutuhan-kebutuhan dan peningkatan mutu pendidikan. Dengan MBM unsur pokok sekolah, memegang kontrol yang lebih besar pada setiap kejadian di sekolah. Unsur pokok sekolah inilah yang kemudian menjadi lembaga non struktural yang disebut dewan sekolah atau komite madrasah yang anggotanya terdiri dari guru, kepala sekolah, administrator, orang tua, anggota masyarakat dan murid. Oleh karena itu, MBM memerlukan upaya-upaya penyatupaduan atau penyelarasan sehingga pelaksanaan pengaturan berbagai komponen sekolah tidak tumpang tindih, berbenturan, saling lempar tugas dan tanggung jawab. Tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Salah satu tujuan pembentukan Komite Sekolah adalah meningkatkan tangung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di dalam satuan pendidikan.[[37]](#footnote-38)

Jadi, Manajemen berbasis madrasah (MBM) secara sederhana dapat didefinisikan sebagai desentralisasi kewenangan pembuatan keputusan pada tingkat madrasah. Pembuatan keputusan merupakan inti dari keseluruhan proses dan substansi tugas manajemen madrasah. Manajemen berbasis madrasah (MBM) juga merupakan salah satu wujud dari reformasi pendidikan yang menawarkan kepada sekolah untuk menyediakan pendidikan yang lebih baik dan memadai bagi para peserta didik. Otonomi dalam manajemen, merupakan potensi bagi sekolah untuk meningkatkan kinerja staf, menawarkan partisipasi langsung kelompo-kelompok yang terkait, dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pendidikan. Jadi, MBS merupakan sebuah strategi untuk memajukan pendidikan dengan mentransfer keputusan penting memberikan otoritas dari negara dan pemerintah daerah kepada individu pelaksana di sekolah. MBS menyediakan kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua sebagai pusat kontrol yang sangat besar dalam proses pendidikan dengan memberi mereka tanggung jawab untuk memutuskan anggaran, personil di lingkungan pendidikan di madrasah.

Dengan demikian manajemen berbasis madrasah (MBM) adalah salah satu dari beberapa bentuk reformasi pendidikan dalam rangka memperbaiki pendidikan, terutama memperbaiki lingkungan pengajaran dan pembelajaran bagi siswa serta mutu dalm satuan pendidikan. Namun, ada beberapa pendapat juga mengingatkan bahwa dalam pelaksanaannya sering terjadi salah konsentrasi, yang seharusnya terfokus pada aktivitas pengajaran malah seringkali perhatiannya terpusat pada kedisiplinan siswa.

1. **Konsep Dasar Manajemen Berbasis Madrasah**

Manajemen berbasis madrasah (MBM) merupakan strategi untuk mewujudkan madrasah yang efektif dan produktif. MBM merupakan paradikma baru manajemen pendidikan, yang memberikan otonomi luas pada madrasah dan pelibatan masyarakat dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. otonomi ini diberikan supaya madrasah leluasa mengelolah sumber daya, sumber dana, sumber belajar, dan melokasikannya sesuan dengan kebutuhan, serta lebih tanggap terhadap kebutuhan setempat.[[38]](#footnote-39)

Manajemen berbasis madrasah (MBM) ini adalah sebuah ide tentang pengambilan keputusan pendidikan pendidikan yang diletakkan pada posisi yang paling dekat dengan pembelajaran itu yakni madrasah. Dengan pemberian otonomi luas kepada madrasah, pemerintah tidak hanya telah menunjukkan sikap tanggapnya terhadap tuntutan masyarakat, namun juga merupakan sarana peningkatan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan. Disamping itu, kerisis multidimensi yang dihadapi oleh Indonesia sekarang ini tidak dapat dihindari dampaknya terhadap pendidkan, terutama kurangnya kemampuan pemerintah dalam penyediaan dana yang memadai untuk pendidikan serta menurunnya mutu pendidikan dan terganggunya proses pemerataan. Melalui keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pendidikan di madrasah, pemerintah akan merasa terbantu dalam pengontrolan maupun dalam pembiayaan dan pelayanan pendidikan sehingga pemerintah dapat lebih berkonsentrasi pada masyarakatyang kurang mampu yang semangkin bertambah saat ini. Dalam penerapannya, keterlibatan kepala madrasah dan guru dalam pengambilan keputusan akan mengakibatkan rasa kepemilikan yang lebih tinggi terhadap madrasah, sehingga akan mendorong mereka untuk mendayagunakan sumber daya yang ada seefisien mungkin guna mencapai hasil yang optimal. Konsep ini didasarkan pada sebuah teori yang mengatakan bahwa jika seseorang memiliki kekuasaan dalam pengambilan suatu keputusan, maka akan memiliki tanggung jawab yang besar untuk melaksanakan keputusan tersebut.[[39]](#footnote-40)

Dengan demikian, manajemen berbasis madrasah adalah pengelolaan yang sangat baik dilakukan oleh madrasah dengan melibatkan berbagai pihak seperti orang tua/wali serta masyarakat yang punya perhatian dan rasa tanggung jawab terhadap pendidikan di madrasah. dalam penerapannya, kepala madrasah selaku ujung tombak kekuasan harus selalu sigap dan selalu memperhatikan kebutuhan madrasah dalam setiap pengambilan keputusan dan kebijakan serta tetap melibatkan guru yang professional sehingga dapat mencapai hasil serta mutu pendidikan yang lebih baik.

1. **Tujuan Dibentuknya Manajemen Berbasis Madrasah**

Tujuan utama Manajemen Berbasis Sekolah adalah meningkatkan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan. Peningkatan efisiensi diperoleh melalui keleluasaan mengelola sumber daya yang ada, partisipasi masyarakat, dan penyederhanaan birokrasi. Peningkatan mutu diperoleh melalui partisipasi orang tua, kelenturan pengelolaan sekolah, peningkatan profesionalisme guru, adanya hadiah dan hukuman sebagai kontrol, serta hal lain yang dapat menumbuh kembangkan suasana yang kondusif.[[40]](#footnote-41)

Sementara itu baik berdasarkan kajian pelaksanaan di negara-negara lain, maupun yang tersurat dan tersirat dalam kebijakan pemerintah dan UU sisdiknas NO. 20 Tahun 2003, tentang Pendidikan Berbasis Masyarakat pasal 55 ayat 1: Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan non formal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat. Berkaitan dengan pasal tersebut setidaknya ada empat aspek yaitu: *kualitas* (mutu) dan *relevansi, keadilan, efektifitas* dan *efisiensi*, serta *akuntabilitas.*

1. MBS bertujuan mencapai mutu *quality* dan relevansi pendidikan yang setinggi-tingginya, dengan tolok ukur penilaian pada hasil *output* dan *outcome* bukan pada metodologi atau prosesnya. Mutu dan relevansi ada yang memandangnya sebagai satu kesatuan substansi, artinya hasil pendidikan yang bermutu sekaligus yang relevan dengan berbagai kebutuhan dan konteksnya. Bagi yang memisahkan keduanya, maka mutu lebih merujuk pada dicapainya tujuan spesifik oleh siswa (lulusan), seperti nilai ujian atau prestasi lainnya, sedangkan relevansi lebih merujuk pada manfaat dari apa yang diperoleh siswa melalui pendidikan dalam berbagai lingkup/tuntutan kehidupan (dampak), termasuk juga ranah pendidikan yang tidak diujikan.
2. MBS bertujuan menjamin keadilan bagi setiap anak untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu disekolah yang bersangkutan. Dengan asumsi bahwa setiap anak berpotensi untuk belajar, maka MBS member keleluasaan kepada setiap sekolah untuk menangani setiap anak dengan latar belakang social ekonomi dan psikologis yang beragam untuk memperoleh kesempatan dan layanan yang memungkinkan semua anak dan masing-masing anak berkembang secara optimal. Sungguhpun antara sekolah harus saling memacu prestasi, tetapi setiap sekolah harus melayani setiap anak (bukan hanya yang pandai), dan secara keseluruhan sekolah harus mencapai standar kompetensi minimal bagi setiap anak yang diluluskan. Keadilan ini begitu penting, sehingga para ahli sekolah efektif menyingkat tujuan sekolah efektif hanya mutu dan keadilan atau .*quality and equity*..
3. MBS bertujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi. Efektifitas berhubungan dengan proses, prosedur, dan ketepat-gunaan semua input yang dipaki dalam proses pendidikan disekolah, sehingga menghasilkan hasil belajar siswa seperti yang diharapkan (sesuai tujuan). Efektif-tidaknya suatu sekolah diketahui lebih pasti setelah ada hasil, atau dinilai hasilnya. Sebaliknya untuk mencapai hasil yang baik, diupayakan menerapkan indikator-indikator atau cirri-ciri sekolah efektif. Dengan menerapkan MBS diharapkan setiap sekolah, sesuai kondisi masing-masing, dapat menerapkan metode yang tepat (yang dikuasai), dan input lain yang tepat pula (sesuai lingkungan dan konteks social budaya), sehingga semua input tepat guna dan tepat sasaran. Atau dengan kata lain, efektif untuk meningkatkan mutu pendidikan. Sementara itu, efisiensi berhubungan dengan nilai uang yang dikeluarkan atau harga (cost) untuk memenuhi semua input (proses dan semua input yang digunakan dalam proses) dibandingkan atau dihubungkan dengan hasilnya (hasil belajar siswa).
4. MBS bertujuan meningkatkan akuntabilitas sekolah dan komitmen semua stake holders. Akuntabilitas adalah pertanggung jawaban atas semua yang dikerjakan sesuai wewenang dan tanggung jawab yang diperolehnya. Selama ini pertanggung jawaban sekolah lebih pada masalah administrative keuangan dan bersifat vertical sesuai jalur birokrasi. Pertanggung jawaban yang bersifat teknis edukatif terbatas pada pelaksanaan program sesuai petunjuk dan pedoman dari pusat (pusat dalam arti nasional, maupun pusatpusat birokrasi di bawahnya), tanpa pertanggung jawaban hasil pelaksanaan program.[[41]](#footnote-42)
5. **Pengertian Komite Madrasah**

Di dalam kamus besar baha Indonesia (KKBI) disebutkan bahwa peran berarti bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan[[42]](#footnote-43) Komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan baik pada jalur pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah.[[43]](#footnote-44)

Komite sekolah atau komite madrasah merupakan sebuah lembaga mandiri yang beranggotakan dari orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli akan pendidikan.[[44]](#footnote-45)

Adapun komite sekolah atau komite madrasah ini merupakan suatu badan atau lembaga yang dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para *stakeholder* pendidkan pada tingkat satuan pendidikan dari berbagai unsur yang bertanggung jawab dalam peningkatan proses pendidikan yang mana komite ini merupakan badan yang bersifat mandiri.[[45]](#footnote-46)

Secara substansi dari beberapa istilah tersebut tidak begitu mengalami perbedaan, yang membedakan hanya terletak pada pengoptimalan peran serta masyarakat dalam mendukung dan mewujudkan mutu pendidikan. Selain itu, komite madrasah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan di luar sekolah. selain itu juga bahwa komite sekolah atau komite madrasah memiliki kemandirian masing-masing namun tetap sebagai mitra yang harus saling bekerja sama dalam pemberdayaan serta peran masyarakat.

Adapun komite madrasah merupakan nama baru pengganti Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3) yang berperan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Dengan kata lain, keberhasilan dalam penyelenggaraan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan juga pemerintah propinsi, kabupaten/kota, dan pihak sekolah, orang tua, dan masyarakat atau *stakeholder* pendidikan. Hal ini sesuai dengan konsep Partisipasi Berbasis Masyarakat (*community based participation*) dan Manajemen Berbasis Sekolah (*school based management*) yang kini tidak hanya menjadi wacana, tetapi mulai dilaksanakan di Indonesia. Inti dari penerapan kedua konsep tersebut adalah bagaimana agar sekolah dan semua yang berkompeten atau *stakeholder* pendidikan dapat memberikan layanan pendidikan yang berkualitas. Untuk itu diperlukan kerjasama yang sinergis dari pihak sekolah, keluarga, dan masyarakat atau *stakeholder* lainnya secara sistematik sebagai wujud peran serta dalam melakukan pengelolaan pendidikan. Supaya tidak menjadi tumpang tindih beban dan tanggung jawab di antara *stakeholder* pendidikan, maka diperlukan suatu lembagab yang independen, demokratis, transparan yang dapat dipercaya oleh seluruh lapisan masyarakat. Untuk mewadahi peran dan tanggung jawab serta wewenang yang seimbang dan proporsional antara sekolah, wali murid dan masyarakat serta *stakeholder* lainnya, maka untuk itu dibentuklah komite sekolah.

* + - 1. Kepengurusan Komite Madrasah

Pembentukan komite madrasah harus dilakukan secara transparan, akuntabel dan demokratis. Dilakukan secara transparan adalah komite madrasah harus dibentuk secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat mulai dari tahap pembentukan panitia persiapan, proses, sosialisasi oleh panitia persiapan, criteria calon anggota, proses seleksi calon anggota, pengumuman calon anggota, proses pemilihan sampai penyampaian hasil pemilihan. Secara akuntabel adalah panitia hendaknya menyampaikan laporan pertanggung jawaban kinerjanya maupun pengguna dana kepanitiaan. Dan secara demokratis maksudnya adalah dalam proses pemilihan anggota dan pengurus dilakukan dengan musyawarah mufakat dan jika dipandang perlu pemilihan anggota serta pengurus komite madrasah dapat dilakukan dengan pemungutan suara.[[46]](#footnote-47)

* + - 1. Peran Komite Madrasah

Sebelum terbentuknya komite sekolah, BP3 yang tugasnya adalah membantu sekolah agar proses belajar siswa menjadi lebih lancer, terutama yang berkaitan dan yang dapat dikaitkan dengan masyarakat. Namun kegiatan badan ini sebagian besar baru pada usaha pengumpulan dana dan mewujudkan dana menjadi barang-barang atau bangunan untuk keperluan sekolah.[[47]](#footnote-48)

Pada saat ini, keberadaan komite madrasah/komite sekolah dalam dunia pendidikan harus bertumpu pada landasan partisifasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas dan hasil pendidikan di sekolah atau madrasah. Dari itu, dalam pembentukannya harus memperhatikan berbagai perannya seperti:

* 1. Sebagai pemberi pertimbangan *(advisory agency)* dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan.
  2. Sebagai pendukung *(supporting agency)*  baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan.
  3. Sebagai Pengontrol *(controlling agency)* dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan pengeluaran di satuan pendidikan.
  4. Sebagai mediator antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Daerah dengan masyarakat.[[48]](#footnote-49)
     + 1. Tujuan Dibertuknya Komite Madrasah
          1. Mewadahi dan menyalurkan aspirassi serta prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan.
          2. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
          3. Menciptakan suasana dan kondisi trasparan, akuntabel dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.[[49]](#footnote-50)

Dengan demikian, sebuah kerjasama  lembaga pendidikan dengan komite madrasah/sekolah  merupakan bukti kepedulian dan tanggung jawab mereka tehadap dunia pendidikan. Para orang tua telah menitipkan anak mereka pada lembaga agar diajar dan dididik oleh guru, sehingga anak-anak mereka kelak tidak hanya mampu dalam pendidikan umum namun juga menjadi anak yang sholeh/sholehah. Setelah dititipkan, anak-anak tersebut menjadi tanggung-jawab guru sepenuhnya di madrasah. Sedangkan oang tua sebagai wali murid berkewajiban memenuhi segala keperluan anaknya yang berhubungan dengan pendididkan mereka, seperti : memberikan seragam sekolah, membelikan alat tulis, membayar uang madrasah dan lain-lain. Sebagai wujud kerjasamanya, bahkan tidak sedikit orang tua / wali murid yang turut ambil bagian dalam pembangunan suatu sekolah atau Madrasah di mana anak-anak mereka menuntut ilmu. Dengan niat jihad fisabilillah dan demi pendiddikan anak-anak mereka dan demi masa depan bangsa dan agama, baik dengan harta, serta dengan akal pikiran dan ide-ide mereka. Dengan adanya kerja sama seperti ini maka hubungan sekolah  dengan masyarakat melalui jalan alternatif komite sekolah tetap terjaga dengan baik

**BAB III**

**DESKRIPSI WILAYAH MTs NEGERI I MODEL PALEMBANG**

1. **Sejarah Berdirinya MTs N 1 Model Palembang**

Berdirinya MTs Negeri I Model Palembang, yang mana pada awalnya bernama MTs Madinatul Ulum yang di kelola oleh Yayasan Pendidikan Madinatul Ulum (YPMU), yang berlokasi di Lorong Kedukan Bukit di daerah 35 Ilir Palembang, dengan pembangunan gedung ruang belajar untuk pertama kalinya belangsung pada tahun 1951. adapun tenaga pendidik dan pengelola madrasah terdiri dari tokoh masyarakat dan alim ulama.

Dari tanggal 1 januari 1961 hingga tanggal 20 Januari 1968 Yayasan Pendidikan Madinatul Ulum  yang merupakan institusi swasta dan  berbadan hukum (dengan akte Tan Thongkie Nomor : 8 Tahun 1962) mengelola dua madrasah dalam 2 tingkatan yaitu MTs setingkat dengan SLTP dan Madrasah Aliyah (MA) setingkat dengan SMA. Selama masa tersebut kedua madrasah yang dikelola YPMU berkembang dengan pesat dan pada akhir menarik perhatian Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, yang dikala itu di jabat olah H. Ahmad Bastari, untuk berkunjung ke madrasah tersebut yang kemudian ditindaklanjuti dengan pembinaan dari pihak pemerintah daerah secara berkesinambungan. Melihat keseriusan pemerintah dalam memberikan pembinaan dan desakan situasi kondisi pada saat itu, maka pihak yayasan pada tanggal 4 agustus 1967 memutuskan untuk menyerahkan Madrasah Tsanawiyah (MTs) kepada pihak pemerintah untuk dinegerikan.

Adapun proses perubahan status MTs tersebut menjadi MTs Negeri, melalui Kepala Kantor Inspeksi Pendidikan Agama TK. I Provinsi Sumatera Selatan, dengan Surat Keputusan Nomor : 3751 B Mdr.f. 15. 1967, tanggal 11 Nopember 19967. selanjutnya usulan penegerian ini diteruskan ke Direktorat Pendidikan Agama RI di Jakarta, dari sini  Madrasah tersebut sementara waktu statusnya berubah menjadi madrasah persiapan negeri. Dan akhirnya pada tanggal 20 Agustus 1968 Status MTs Madinatul Ulum berubah menjadi Madrasah negeri dengan nama Madrasah Tsanawiyah Agama Islam Negeri Palembang yang disingkat dengan MTs. AIN, berdasarkan surat keputusan Menteri Agama R.I Nomor : 8 Tahun 1968. Nama MTs. AIN Palembang kemudian berubah menjadi MTs Negeri I Palembang pada tanggal 4 Agustus 1970 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama R.I Nomor : 164 Tahun 1970.

1. **Visi dan Misi Serta Tujuan madrasah**

VISI

TERWUJUDNYA GENERASI CERDAS HATI DAN PIKIR, TRAMPIL, SERTA SIAP BERKOMPETISI

MISI

1. Mewujudkan kurikulum tingkat satuan Pendidikan (KTSP) berstandar Nasional
2. Menyelenggarakan proses KBM yang aktif, inovatif, efektif dan menyenangkan melalui multi pendekatan belajar yang berorientasi pada peningkatan kualitas penuntasan belajar
3. Mewujudkan MTs N 1 Palembang sebagai madrasah unggulan dan favorit
4. Mengembangkan penguasaan dan pengamalan IMTAQ disertai ketrampilan  penguasaan IPTEK,  Berbahasa Indonesia, Berbahasa Inggris dan Berbahasa Arab
5. Meningkatkan prestasi dalam bidang akademik dan non akademis meliputi seni, olahraga, minat baca, budaya berdiskusi dan  bela Negara yang diawali dengan  suatu sistem penerimaan siswa baru yang baku dan terukur
6. Mewujudkan sarana dan prasarana (fasilitas) pendidikan yang kontributif bagi pengembangan pendidikan dan pembelajaran yang bertaraf nasional
7. Mewujudkan peningkatan mutu kelembagaan dan sistem manajemen yang memungkinkan terjadinya pengembangan prestasi, kompetensi dan kualifikasi bagi setiap komponen madrasah yang konsisten  dengan pengembangan Madrasah  Bertaraf Nasional
8. Mewujudkan partisipasi masyarakat secara optimal hingga terpenuhinya standar pembiayaan dengan cara mengakses berbagai momentum untuk kepentingan Madrasah

TUJUAN:

  Dalam jangka Empat Tahun Kedepan (2010 s.d 2014), tujuan yang hendak dicapai oleh MTs Negeri I Palembang adalah :

1. Terselenggaranya proses KBM yang Aktif, Inovatif, Efektif dan menyenagkan melalui penggunaan multi pendekatan belajar yang mengaju pada kurikulum tingkat satuan MTs Negeri I Palembang
2. Tercapainya peningkatan kualitas penuntasan belajar melalui proses pembelajaran dan bimbingan yang memenuhi standar nasional
3. Terselengaranya kegiatan keunggulan madrasah yang berbasis religi dan nilai-nilai karakter kebangsaan
4. Tercapainya peningkatan nilai rata-rata hasil Ujian Nasional dan Ujian Sekolah pada setiap mata pelajaran ( 75 )
5. Terpenuhinya sarana dan prasarana (fasilitas) pendidikan yang kontributif bagi pengembangan pendidikan dan pembelajaran yang bertaraf nasional
6. Tercapainya peningkatan penguasaan dan pengamalan IMTAQ dalam keseharian disertai penguasaan ketrampilan dasar IPTEK, bahasa Inggris, dan bahasa Arab
7. Tercapainya peningkatan prestasi akademis dan non akademik kejenjang Nasional
8. Terciptanya sistem yang memungkinkan terjadinya pengembangan prestasi, kompetensi dan kualifikasi guru yang berstandar nasional
9. Terselenggaranya peningkatan mutu kelembagaan dan manajemen sehingga terbangun kemandirian Madrasah dalam pelayanan administrsi, pencapaian SPM, serta efektifitas sistem monitoring, evaluasi dan supervisi
10. Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat secara optimal hingga terpenuhinya standar pembiayaan dengan cara mengakses berbagai momentum untuk kepentingan Madrasah
11. Terselenggaranya sistem penerimaan siswa baru yang konsisten  dengan pengembangan Madrasah berbasis keunggulan

Lokasi MTs Negeri I Palembang dalam perjalanannya mengalami bebarapa kali perubahan lokasi, muali dari berstatus swasta (MTs Madinatul Ulum ) hingga menjadi MTs Negeri I Palembang, yang sekarang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman Km. 4 Palembang, bersebrangan dengan lokasi Taman Makam Pahlawan Ksatria Siguntang Palembang. Untuk jelasnya secara berurutan sebagai berikut :

1. Lorong Kedukan Bukit I 35 Ilir Palembang, dari  1961 s.d 1968 dengan status MTs YPMU
2. Lorong Ketandan 16 Ilir Palembang menempati Gedung sekolah Cina dari tanggal 15 April s.d tanggal 31 Januari 1976, dengan status MTs AIN
3. Jalan Jendral Sudirman Km 4 Palembang  dari tanggal 1 Februari 1976 hingga sekarang dengan nama MTs Negeri I Palembang

Demikian sejarah MTs Negeri I Palembang, dari urai tersebut pun dapat dibuktikan bahwa madarasah merupakan lembaga pendidikan yang lahir dari masyarakat dan untuk itu untuk berkembang lebih maju maka madrasah tidak dapat terlepas dari uluran tangan dari masyarakat.

1. **Kondisi Objektif Madrasah**

Kegiatan belajar mengajar yang dilakukan setiap hari di MTs Negeri 1 Model Palembang adalah hari senin dan sabtu. Setiap hari senin dilakukan upacara bendera pukul 07.00-07.35 WIB dan 20 menit sebelum belajar para wali kelas memberi pengarahan. Pada hari senin proses pembelajaran dilakasanakan pada pukul 08.10 -14.00 WIB. Pada hari selasa, rabu, kamis proses pembelajaran dilaksanakan pada pukul 07.00-13.00 WIB. Pada hari jum’at dilaksanakan senam pagi 07.00-07.40 WIB. Dan setelah itu proses pembelajaran dilaksanakan pada pukul 07.40-11.20 WIB. Dan pada hari sabtu proses pembelajaran dilaksanakan pada pukul 07.00-12.15 WIB. Kegiatan belajar mengajar di MTs Negeri 1 Palembang ini dilaksanakan selama 40 menit dalam 1(satu) jam pelajaran.

Kepimpinan sebuah lembaga pendidikan merupakan komponen yang essensial dalam proses perkembangan yang dinamis mengarah kepada selalu meningkatnya kualitas proses aktivitas system dan produk (out come)secara bertahap. MTs. Negeri I Palembang sejak awal berdirinya (berstatus swasta) hingga saat ini telah  mengalami beberapa kali pergantian kepemimpinan sebagai berikut :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Periode** | **Nama** | **Masa Jabatan** |
| 1 | Periode I | K. M. Agus Salim | 1961-1968 |
| 2 | Periode II | K. M. Arsyad | 1969-1970 |
| 3 | Periode III | K. M. A. Murod | 1970-1970 |
| 4 | Periode IV | Abdul Murod Senang | 1970-1971 |
| 5 | Periode V | A. Ghufron M. N | 1972-1977 |
| 6 | Periode VI | Amirudin Kalabeh | 1977-1981 |
| 7 | Periode VII | Drs. M. Ali Sadoh | 1982-1992 |
| 8 | Perode VIII | Drs. Maidi Alimisun | 1992-1998 |
| 9 | Periode IX | Drs. M. Zuhdi Zakaria | 1998-2000 |
| 10 | Periode X | Drs. Ali Ikhwan Noer, M. Pd.I | 2000-2004 |
| 11 | Periode XI | Drs. Ahmad Zainuri, M. Pd. I | 2004-2007 |
| 12 | Periode XII | Drs. Iman Suryadi | 2007-2009 |
| 13 | Periode XIII | Dra. Hj. Yeni sufri yani, M. Pd I | 2009-sekarang |

1. **Struktur Organisasi Madrasah**

Struktur organisasi merupakan faktor yang tak kalah penting pada setiap lembaga atau instansi. Dengan adanya struktur organisasi ini maka setiap personalnya yang terlihat di dalamnya akan teratur dan memahami jalur tugas masing-masing yang mempunyai hak dan tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan yang berlaku dan disepakati dalam musyawarah bersama.

Selain supaya terarahnya dari tugas-tugas yang dijalankan oleh para elemen madrasah, struktur organisasi ini juga perlu untuk menjadikan madrasah yang demokratis serta tenaga administrasi yang professional dalam lembaga pendidikan di madrasah. Adapun truktur organisasi MTs N I Model Palembang seperti di bawah ini:

**STRUKTUR ORGANISASI KOMITE MADRASAH**

**MTS N I MODEL PALEMBANG**

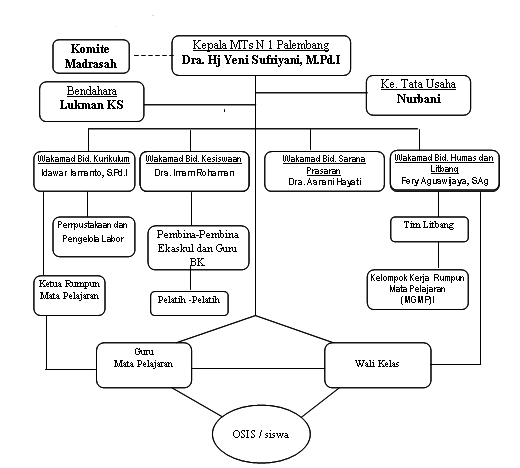
* + - 1. Ketua Komite Madrasah : H. Ghandi Arius, SH.,Mhum
      2. Wakil Ketua Komite Madrasah : H. M. Elvhik Quirino
      3. Sekretaris Komite Madrasah : H. Ibrahim Fauzi
      4. Bendahara Komite Madrasah : Drs. Aspian
      5. Bidang Pengendalian Kualitas pelayanan Pendidikan : Ihsanudin, M.Pd
      6. Bidang Penggalian Sumber Dana Madrasah : Mukhsinum
      7. Bidang Sarana dan Prasarana : Eddy Suhaimi
      8. Anggota-anggota : Drs. Abdul Kadir

: Drs. Riadi ali Mesir

: Hesti Pamuji, S.Pd

: Martadinata

**STRUKTUR ORGANISASI MTS N I MODEL PALEMBANG**

**TAHUN PELAJARAN 2011/2012**

1. **Fasilitas Madrasah**

MTs Negri 1 Model Palembang yang terletak dijalan jendral sudirman KM 4 Palembang, wilayah yang strategis untuk melaksanakan proses pembelajaran. MTs Negeri 1 Palembang ini sangat diminati oleh masyarakat yang berdominisili dikota palembang dan sekitarnya. Adapun fasilitas yang dimiliki oleh MTs Negeri 1 Palembang dapat dilihat dalam tabel berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jenis** | **Jumlah** | **Keterangan** |
| 1 | Ruang Belajar | 21 | Dilengkapi 1 buah TV, VCD dan kipas angin disebagian ruang |
| 2 | Laboratorium IPA | 1 |  |
| 3 | Laboratorium Komputer | 1 |  |
| 4 | Laboratorium Bahaasa | 1 |  |
| 5 | Perpustakaan | 1 |  |
| 6 | Ruang BK | 1 |  |
| 7 | Ruang UKS | 1 |  |
| 8 | Lapangan Basket/Fudsal | 1 |  |
| 9 | Mushola/Aula | 1 |  |
| 10 | Tempat Whudu | 1 lokasi |  |
| 11 | Kantin | 3 |  |
| 12 | WC Siswa | 8 |  |
| 13 | Ruang Kantor | 1 |  |
| 14 | Ruang Guru | 1 |  |
| 15 | WC guru | 3 |  |
| 16 | Ruang security | 1 |  |
| 17 | Ruang osis | 1 |  |
| 18 | Komputer P.4 IBM | 35 |  |
| 19 | LCD/ In Fokus | 2 |  |
| 20 | Alat Band | 1 set |  |
| 21 | Alat Rebana | 1 set |  |
| 22 | Alat Nasyid | 1 set |  |
| 23 | Sound Sistem | Ada |  |
| 24 | CD pembelajaran | Ada | Tersedia di perpustakaan |
| 25 | Mading | 3 lokasi |  |

1. **Prosedur Pengelolahan dan Pemeliharaan Fasilitas Madrasah**

Prosedur pengelolahan MTs Negeri 1 Model Palembang dilakukan oleh kepala madrasah yang dibantu oleh para wakilnya, untuk mengelola fasilitas disekolah tersebut. Dengan kata lain apabila pihak sekolah MTs Negeri 1 Palembang akan menggunakan fasilitas sekolah harus ada persetujuan dari kepala madrasah atau yang mewakilinya, dalam proses pelaksanaan belajar mengajar agar berjalan denga baik dan teratur sehingga tercapai tujuan yang diharapkan secara efektif dan efesien.

Pemeliharaan fasilitas sekolah dalam operasionalnya secara umum dilakukan oleh seluruh unsur sekolah yang ada. Dan secara khusus dilimpahkan kepada petugas yang diberi tanggung jawab untuk memeliharanya yang biasa disebut dengan penjaga sekolah. Dikarenakan gedung MTs Negeri 1 Palembang ini adalah milik pemerintah, maka pemeliharaan fasilitas sekolah serta sarana dan fisiknyaperlu ada kordinasi yang baik dan jelas dengan petugas pelaksanaan yang diwujudkan dalam plaksanaah piket masing-masing setiap hari.

Selain itu untuk memlihara fasilitas yang ada. Maka diperlukan kerja sama yang baik antara petugas kebersihan sekolah dan dibantu oleh para siswa-siswi melalui program 5K dan diadakannya piket kelas, fasilitas sekolah yang mendukung berlangsungnya proses belajar mengajar dapat digukan dan dimanfaatkan. Seperti lapangan olahraga berserta perlengkapanya, buku-buku pelajaran yang ada serta media atau alat bantu yang mendukung lainya. Adapun pengelolaan yang dimaksud disini adalah sebagai berikut;

* 1. Pengelaolaan kelas
  2. Pengaturan kelas dan perabotanya
  3. Tata ruang kelas
  4. Pengadaan piket umum bergilir
  5. Penataan taman sekolah

1. **Personil Madrasah**

Jumlah personil MTs Negeri 1 Palembang pada tahun 2011/2012 seluruhnya berjumlah 80 dengan rincian sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Personil** | **Jumlah (orang)** |
| 1 | Guru tetap | 53 |
| 2 | Guru tidak tetap | 8 |
| 3 | Pegawai tetap | 6 |
| 4 | Pegawai tidak tetap | 13 |
|  | **Jumlah** | **80** |

* + - 1. **Guru Mata Pelajaran**

Guru mata pelajaran adalah guru yang bertugas melaksanakan proses belajar mengajar dikelas. MTs Negeri 1 palembang setiap guru memegang mata pelajaran dan mengajar dikelas yang telah ditentukan dan disepakati, yang telah diseduaikan dengan jalur pendidikan dan kemampuan guru tersebut.

Guru atau tenaga pengajar di MTs Negeri 1 palembang berasal dari latar belakang yang berbeda (beragam) sesuai dengan bidangnya, dan mereka mengajar sesuai dengan bidangnya masing-masing yang telah disepakati. Adapun guru yang memegang mata pelajaran di MTs Negeri 1 Palembang sesuai dengan keputusan kepala MTs Negeri 1 palembang sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama** | **Pelajaran** | **Jmlh Jam** | **Kelas** |
| 1 | Dra. Hj. Yeni sufri Yani, M. Pd.I | IPS | 8 | IX |
| 2 | Dra. Arnaini | IPS | 20 | VII |
| 3 | Cholilatul M. S. Ag | IPS | 20 | VII, VIII |
| 4 | Dra. Nurmala Depi | IPS | 24 | VIII, IX |
| 5 | Drs. H. Napolion | IPS | 12 | VIII, IX |
| 6 | Usman Saleh S. Pd | IPS | 8 | IX |
|  |  | PPKN | 14 | VIII |
|  | | | | |
| 1 | Idwar Ismanto S. Pd I | Matetatika | 18 | VIII |
| 2 | Drs. Imam Rohman | Matetatika | 18 | VII |
| 3 | Dra. Asnani Hayati | Matetatika | 18 | IX |
| 4 | Dra. Suaidah | Matetatika | 24 | VII, VIII |
| 5 | Dra, Fatmawati | Matetatika | 24 | VIII, IX |
| 6 | Drs. Fathir Ilmy | Matetatika | 24 | VII, IX |
|  | | | | |
| 1 | Arma Rifia S. Pd | IPA | 12 | VII |
| 2 | Dra. Suhastati | IPA | 24 | VII, VIII |
| 3 | Dra. Susi alpia | IPA | 24 | VIII |
| 4 | Dra. Hidayati | IPA | 24 | VIII, IX |
| 5 | Dra. Zainab | IPA | 24 | IX |
| 6 | Rofiqoh dini, S. Pd | IPA | 18 | VII |
|  | | | | |
| 1 | Hj. Edda rosini R. S. Pd I | B. Inggris | 25 | VII |
| 2 | Dra. Nnurhayati RW | B. Inggris | 25 | VIII |
| 3 | Listya yustika R. S. Pd | B. Inggris | 24 | IX |
| 4 | Imamdu S. Pd | B. Inggris | 18 | IX |
| 5 | Nurlela Ayunara, S. Pd | B. Inggris | 20 | VII, VIII |
|  | | | | |
| 1 | Irma suryani S. Pd, M. Pd I | B. Indonesia | 20 | VII, VIII |
| 2 | Maisaroh S. Pd. I | B. Indonesia | 20 | VII |
| 3 | Dra. Irzawati, M. Pd | B. Indonesia | 20 | IX |
| 4 | Rinaida, S. Pd | B. Indonesia | 20 | VIII, IX |
| 5 | Nurhayati, S. Pd | B. Indonesia | 12 | VIII, IX |
|  | | | | |
| 1 | Haris fadilah, S. Pd I | B. Arab | 15 | VIII, IX |
|  |  | Imtaq | 3 | IX |
| 2 | Drs. Riadi | B. Arab | 18 | VII |
|  |  | Mulog/Imtaq | 4 | VII |
| 3 | Nurudin, S. Pd I | B. Arab | 12 | VII, VIII |
|  |  | Imtaq | 10 | VII, VIII |
| 4 | Dra. Fauziah, S | B. Arab | 12 | IX |
|  |  | Al-Quran Hadits | 6 | VII |
|  |  | Mulog/Imtaq |  |  |
| 5 | Sosana R H, M. Pd I | B. Arab | 6 | VIII |
|  |  | Al-Quran Hadits | 9 | VII |
|  |  | Mulog/Imtaq |  |  |
|  | | | | |
|  | | | | |
| 1 | Dra. Hj. Sukarmawati | Al-Quran Hadits | 21 | VIII |
|  |  | Mulok / Imtaq |  |  |
| 2 | Siti Zainab | Al-Quran Hadits | 21 | IX |
|  |  | Mulok / Imtaq |  |  |
|  | | | | |
| 1 | Ermawati, S. Ag | SKI | 21 | VII |
|  |  | Imtaq/ Muloq |  |  |
| 2 | Fatmawati, S. Pd I | SKI | 21 | VIII |
|  |  | Imtaq/ Muloq |  |  |
| 3 | Drs, Hasnarita | SKI | 21 | IX |
|  | | | | |
| 1 | Hj. Huslani Zen S. Pd I | Aqidah/ Akhlak | 21 | VII |
|  |  | Mulok/ Imtaq |  |  |
| 2 | Dra. Haridah | Aqidah/ Akhlak | 21 | VIII |
|  |  | Mulok/ Imtaq |  |  |
| 3 | Dra. Hj. Ermita | Aqidah/ Akhlak | 21 | IX |
|  |  | Mulok/ Imtaq |  |  |
|  | | | | |
| 1 | Fauziah wazier S. Pd I | Fiqih | 18 | IX |
|  |  | Mulog/ Imtaq |  |  |
| 2 | Hj. Komalasari S. Pd I | Fiqih | 18 | VII, IX |
|  |  | Mulog/ Imtaq |  |  |
| 3 | Asmiyati, S. Pd I | Fiqih | 18 | VII, VIII |
|  |  | Mulog/ Imtaq |  |  |
| 4 | Zikri A S. Pd I | Fiqih | 9 | VII |
|  |  | Mulog/ Imtaq | 4 | VII |
|  |  | Penjaskes | 6 | VII |
|  | | | | |
| 1 | Adi daya, S Pd | Penjaskes | 20 | VII, VIII |
| 2 | Sadarman, S. Pd | Penjaskes | 16 | VIII, IX |
|  | | | | |
| 1 | Dra. Ermawati | Seni budaya | 20 | VIII, IX |
| 2 | Kartini, S. Pd I | Seni budaya | 14 | VIII |
|  | | | | |
| 1 | Karyana S. Pd I | PKn | 14 | VII |
| 2 | Hj. Nani Nuraeni, S. Pd | PKn | 14 | IX |
|  | | | | |
| 1 | Abdul hamid, S. Ag | Mulog | 18 | VII, IX |
|  |  | Imtaq | 4 | IX |
| 2 | Hj. Ondiana S. Ag | Mulog | 10 | VIII |
|  |  | Imtaq | 4 | VIII |
| 3 | Drs. H. Yahmad Haris | Mulog/Imtaq |  | VII, VIII, IX |
| 4 | Nurhidayah, S. Pd I | Mulog | 10 | VII |
|  |  | Imtaq | 5 | VII |
| 5 | Lily Septiyanty, S. Pd I | Mulog | 4 | VII |
|  |  | Al-Qurn Hadits | 6 | VII |
|  |  | Imtaq | 2 | VII |
|  | | | | |
| 1 | Retno Hadi, S. Pd | TIK | 14 | VII, VIII, IX |
|  |  | Seni Budaya | 8 | VIII |
| 2 | Anton Subagio, S. Pd I. MM | TIK | 14 | VII, VIII, IX |
| 3 | Yuswardi | TIK | 14 | VII, VIII, IX |
|  | | | | |
| 1 | Piutami, S. Pd | BK |  | VIII, IX |
| 2 | Eka Five Rienty, S. Pd | BK |  | VII, IX |

* + - 1. **Wali Kelas**

Wali kelas adalah guru yang bertanggung jawab terhadap kemajuan serta perkembangan kelas yang diasuhnyabaik dari segi prestasi belajar maupun dari segi tingkah laku siswa-siswinya. Oleh karena itu seorang wali kelas harus mengenali siswa-siswinya secara mendalam agaar maudah memberi nasehat, larangan serta tugas-tugas yang harus dilakukan. Wali kelas juga bertanggung jawab terhadap siswa-siswinya yang memiliki kesulitan dalam belajar untuk memberikan pengarahan dan penyuluhan. Karena itu seorang wali kelas juga harus menhetahui latar belakang anak-anak kelasnya serta dapat menjalin hubungan baik kepada anak kelasnya.

Adapun guru yang bertugas sebagai wali kelas di MTs Negeri I Palembang sesuai dengan rincian dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Nama guru** | **Kelas** |
| 1 | Drs. Fathir Ilmy  Dra. Arnaini  Rofiqoh Dini, S. Pd  Dra. Fauziah, S  Ermawati, S. Ag  Irma Suryani, S. Pd. M. Pd I  Naruddin, S. Pd I | VII A  VII B  VII C  VII D  VII E  VII F  VII G |
| 2 | Dra. Fatmawati  Nurlela Ayunara, S. Pd  Dra. Suci Alpia  Asmiati, S. Pd. I  Sosana R H, M. Pd I  Haris Fadillah, S. Pd I  Sadarman. S. Pd | VIII A  VIII B  VIII C  VIII D  VIII E  VIII F  VIII G |
| 3 | Dra. Ermawati  Listya Yustika R. S. Pd  Dra. Hasnarita  Dra. Zainab  Siti zainab. S. Pd I  Dra. Haridah  Imamdu. S. Pd | IX A  IX B  IX C  IX D  IX E  IX F  IX G |

* + - 1. **Guru Piket dan Siaga**

Guru piket dan siaga adalah guru yang melaksanakan piket di sekolah yang bertanggung jawab terhadap kelancaran proses belajar mengajar serta kegitan lainya disekolah. Adapun guru piket dan guru siaga di Mts Negeri I Palembang dengan rincian yang dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Hari** | **Nama Guru** | **Keterangan** |
| 1 | Senin | Usman saleh S. Pd  Arma rifaia, S. Pd | Kepada guru piket dan guru siaga:   * 1. Sudah hadir disekolah pukul 06.45 dan pulang sampai akhir pelajaran   2. Mengontrol dan mendata siswa yang datang terlambat atau izin keluar   3. pada waktuproses pembelajaran berlangsung jika ada guru yang tidak masuk guru piket dan siaga sebagai pengantinya.   4. Mengawasi kebersihan lingkungan madrasah dan mangerahkan siswa untuk piket dilingkungan madrasah sampai mengecek WC |
| 2 | Selasa | Sadarman, S. Pd  Haris fadillah S. Pd I |
| 3 | Rabu | Ermawati S. Ag  Hj. Ondiana S. Ag |
| 4 | Kamis | Sosana rezeki H, M. Pd I  Hj. Nani nuraeni, S. Pd. I |
| 5 | Jum’at | Dra. Hidayati  Dra. Irma suryani |
| 6 | Sabtu | Drs. Suryadi  Ratno hadi, S. Pd |

Untuk menunjang kelancaran tugas piket dan siaga di MTs Negeri 1 Palembang, guru piket dan siaga dibekali dengan buku khusus, absen kehadiran guru dan siswa serta mikropon yang tersedia diruangan piket. Adapun tugas guru piket dan siaga adalah sebagai berikut;

1. Memberikan tanda bel masuk sekolah, bel pergantian jam dan bel pulang.
2. Mengabsen kehadiran guru dan siswa-siswi yang tidak hadiran.
3. Menganti guru yang berhalangan masuk.
4. Mencatan kejadian-kejadian penting disekolah selama tugas piket dan siaga.
5. Memberikan surat izin kepada siswa yang sakit atau ingin keluar karena ada keperluan tertentu.
6. Mengumumkan hal-hal penting lainya.

Untuk koordinator / pembina dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Nama** | **Pembina** |
| 1 | Haris fadillah, S. Pd. I | Pembina Osis |
| 2 |  | Pembina Pramuka |
| 3 | Dra. Nurmala Depi | Pembina 7K |
| 4 |  | Koordinator Kesenian |
| 5 |  | Pembina Laboratorium IPA |
| 6 | Rinaida, S. Pd | Pembina Laboratorium Bahasa |
| 7 | Nurhayati, S. Pd | Pembina Perpustakaan |
| 8 | Karyana, S. Pd I | Pembina PKS |
| 9 | Adi Daya S. Pd | Foodsal |
| 10 | Dra. Nurhayati RW | Pembina UKS |
| 11 |  | Pembina Mading |
| 12 | Drs. H. Napolion | Pembina lap. Komputer |
| 13 | Fauziah Wazier, S. Pd I | Koordinator Imtaq |
| 14 | Piutami, S. Pd | Koordinator BK |

* + - 1. **Keadaan Siswa**

MTs Negeri 1 Palembang memiliki siswa relatif banyak dengan latar belakang pendidikan yang pada umumnya berasal dari sekolah dasar (SD) dibandingkan dari madrasah ibtidai’yah (MI). Berdasarkan data yang diperoleh dari bagian adminitrasi MTs Negeri 1 Palembang bahwa data siswanya adalah sebagai berikut;

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Kelas** | **Siswa** | | **Jumlah** |
| **Lk** | **Pr** |
| 1 | VII A | 16 | 24 | 40 |
| 2 | VII B | 18 | 22 | 40 |
| 3 | VII C | 20 | 20 | 40 |
| 4 | VII D | 18 | 22 | 40 |
| 5 | VII E | 18 | 22 | 40 |
| 6 | VII F | 19 | 21 | 40 |
| 7 | VII G | 18 | 22 | 40 |
| Jumlah Kelas VII | | 127 | 153 | 280 |
| 1 | VIII A | 16 | 18 | 34 |
| 2 | VIII B | 18 | 20 | 38 |
| 3 | VIII C | 17 | 20 | 37 |
| 4 | VIII D | 19 | 19 | 38 |
| 5 | VIII E | 20 | 18 | 38 |
| 6 | VIII F | 19 | 20 | 39 |
| 7 | VIII G | 18 | 20 | 38 |
| Jumlah Kelas VIII | | 127 | 135 | 262 |
| 1 | IX A | 17 | 20 | 37 |
| 2 | IX B | 14 | 21 | 35 |
| 3 | IX C | 17 | 19 | 36 |
| 4 | IX D | 16 | 21 | 37 |
| 5 | IX E | 15 | 20 | 35 |
| 6 | IX F | 16 | 18 | 34 |
| 7 | IX G | 18 | 18 | 36 |
| Jumlah Kelas IX | | 113 | 137 | 250 |

Dan kegiatan siswa merupakan segala aktifitas yang dilakukan siswa yang meliputi kegiatan intra kulikuler. Kegiatan ini dikoordinir oleh wali kepala sekolah pada bidang kesiswaan dan pembina osis. Kegiatan intrakulikuler wajib diikuti oleh seluruh siswa. Sedangkan kegiatan ekstra kulikuler dikoordinasi oleh pihak yang berkompeten dibidangnyan dan guru yang telah ditunjuk oleh kepala sekolah.

* + - 1. **Prestasi Madrasah**

Prestasi yang pernah diraih oleh MTs Negeri 1 Palembang antara lain:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kegiatan** | **Tinggkat** | **Prestasi** | **Tahun** |
| Madrasah berprestasi | Nasional | Juara III | 2006 |
| Kuis persirah bank sumsel TVRI | Provinsi | Juara I | 2006 |
| Madrasah berprestasi | Nasional | Juara II | 2007 |
| Kuis persirah bank sumsel TVRI | Provinsi | Juara I | 2007 |
| Lomba baca puisi (PORSENI) | Provinsi | Juara I | 2007 |
| Lomba khosidah (PORSENI) | Provinsi | Juara I | 2007 |
| Lomba nasyid (PORSENI) | Provinsi | Juara I | 2007 |
| Lomba drama cerita rakyat dibalai bahasa | Provinsi | Juara II | 2007 |
| Lomba baca puisi tingkat pelajar dan mahasiswa IAIN raden fatah palembang | Provinsi | Juara II | 2088 |
| Lomba PKS | Kota Palembang | Juara umum | 2006 |
| Lomba PKS | Kota Palembang | Juara umum | 2007 |
| Lomba PKS | Kota palembang | Juara umum | 2008[[50]](#footnote-51) |

**BAB IV**

**PERAN KOMITE MADRASAH DALAM PENERAPAN MANAJEMEN BERBASIS MADRASAH**

1. **Peran Komite Madrasah di MTs N I Model Palembang**

Komite madrasah sangat membantu dalam pemberdayaan masyarakat dalam rangka ikut memperhatikan dan berpartisifasi di sekolah. Dengan adanya komite madrasah sebagai jembatan antara sekolah dengan masyarakat, maka dapat jalan masuk yang tepat bagi masyarakat untuk dapat berpartisifasi ke madrasah baik berupa ide, pemikiran dan tenaga bahkan yang berupa materi sebagai bukti peran serta masyarakat dalam pendidikan. Tanpa adanya komite madrasah masyarakat enggan dan bahkan tidak berani untuk ikut serta berperan dalam peningkata kualitas pendidikan karena tidak adanya lembaga atau wadah dalam menyampaikan aspirasi serta tidak adanya keterbukaan dan transparansi dari sekolah atau madrasah sehingga masyarakat tidak tahu apa yang harus dibantu dalam memenuhi hal-hal yang dibutuhkan sekolah atau madrasah. Pada saat ini, sejalan dengan berkembangnya program pemerintah yang menerapkan sitem sekolah geratis dengan adanya dana bantuan operasional sekolah (BOS), maka secara pasti peran dari komite madrasah mulai berkurang. Adapun peran komite madrasah dalam di MTs N I Model Palembang dapat diketahui dari hasil wawancara penulis pada beberapa narasumber di lapangan. Berikut ini adalah wawancara tersebut:

Ibu Yeni Sufri Yani selaku kepala madrasah MTs N I Model Palembang mengatakan bahwa pada saat ini memang peran dari komite madrasah aktif namun tidak seaktif dahulu, karena pada saat sekarang ini sudah ada program sekolah gratis dari pemerintah yang mana komite madrasah identiknya adalah sebagai pencari dana dalam pendidikan yang melibatkan wali siswa dan masyarakat. Namun walaupun demikian, komite madrasah sangat berperan sebagai mana perannya sebagai mitra serta pemberi pertimbangan dan pengontrol dalam pendidikan di sekolah, salah satu buktinya adalah komite madrasah selalu memberikan pandangan serta masukan terhadap segala jenis kegiatan yang akan dilakukan oleh madrasah yang berkenaan dengan masyarakat, contohnya ketika madrasah akan mengadakan kegiatan workshop, perlombaan-perlombaan, dan jenis kegiatan kemasyarakatan lainnya. Intinya adalah semua program yang baik pastinya akan disetujui oleh komite madrasah dan madrasahpun tidak akan melakukan kegiatan-kegiatan apalagi kegiatan besar yang melibatkan banyak pihak tanpa seizin dan sepengetahuan komite madrasah.[[51]](#footnote-52)

Sebagaimana kita ketahui bahwa pada saat ini sudah diterapkan sistem sekolah gratis yang mana pemerintah sudah memberikan sumbangan dana yang berbentuk bantuan operasional sekolah (BOS), yang mana sekolah tidak lagi mencari dana melalui komite madrasah untuk membangun madrasah serta sarana dan prasarana sekolah, namun komite madrasah tetap berperan aktif untuk mendukung madrasah, salah satu bentuk perannya ialah ikut berpartisifasi dalam membahas semua pengadaan perangkat-perangkat pembelajaran, sarana prasarana yang sering pada umumnya dilakukan dilakukan pada awal tahun pembelajaran.[[52]](#footnote-53)

Berdasarkan jawaban yang penulis rangkum di atas tentang komite madrasah dan perannya di madrasah, maka penulis mengemukakan bahwa walaupun sekarang pemerintah telah menerapkan pendidikan gratis dengan adanya bantuan operasional sekolah (BOS), namun komite madrasah masih sangat berperan terhadap madrasah seperti sebagai pemberi pertimbangan dan pengontrol dalam pendidikan di madrasah. Selain itu komite madrasah juga sebagai jalan bagi masyarakat untuk dapat berpartisipasi dan terlibat serta ikut merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap pendidikan di madrasah, sehingga masyarakat maupun dunia usaha dapat terlibat dalam pembangunan di madrasah.

Hal ini sesuai dengan konsep peran komite sekolah yang dibuat oleh departemen pendidikan nasional yang menyatakan bahwa peran komite sekolah adalah sebagai pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan, serta pendukung baik berupa finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan, sebagai pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan dan juga sebagai mediator antara pemerintah dengan masyarakat.[[53]](#footnote-54)

Seiring dengan beberapa tanggapan di atas, Ibu Zinab selaku waka kurikulum MTs N I Model Palembang mengatakan bahwa walaupun sekolah sudah dinyatakan gratis, namun komite madrasah tetap aktif apalagi pada awal tahun. Selain itu juga ketika madrasah akan melakukan pengeluaran dana untuk membeli perangkat belajar atau sarana prasarana pembelajaran atau apapun yang berkenaan dengan pendanaan maka semua itu tetap harus sepengetahuan dan persetujuan komite madrasah.[[54]](#footnote-55)

Sama halnya dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Nurmala Depi yang mengatakan bahwa dengan adanya dana bantuan operasional sekolah (BOS) peran komite madrasah tidak seaktif dahulu, dalam artian sebelum adanya sekolah gratis dan dana bantuan operasional sekolah dari pemerintah, tetapi mengenai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan madrasah tetap harus minta pendapat dan saran dari pengurus komite madrasah seperti halnya acara perpisahan siswa kelas sembilan, mencari dana atau sumbangan dari dunia usaha yang ada di luar, semua itu harus seizin dan sepengetahuan komite madrasah. Beliaupun menambahkan bahwa, madrasah tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya komite madrasah karena komite adalah jalan masuknya peran masyarakat sehingga pentingnya ada komite madrasah di madrasah. Sedangkan mengenai keanggotaan komite madrasah di MTs N I Model Palembang berasal dari beberapa orang tua siswa, masyarakat yang peduli terhadap pendidikan. Adapun pengurusnya terdiri atas seorang ketua, wakil ketua, sekertaris dan bendahara, ditambah beberapa orang seksi organisasi dan beberapa anggota.[[55]](#footnote-56)

Dari penjelasan di atas, maka kepengurusan komite madrasah di MTs N I Model Palembang dipilih sesuai dengan pedoman umum komite sekolah yang telah ada yang menyatakan bahwa penngurus komite sekolah atau madrasah itu tidak hanya terbatas dari lingkungan sekolah, tetapi juga dari beberapa elemen masyarakat yang terdiri dari perwakilan orang tua, tokoh dan anggota masyarakat pejabat pemerintahan, dinia usaha, pakar pendidikan yang memang benar-benar memperhatikan dan peduli terhadap pendidikan. Dengan melibatkan semua lapisan masyarakat dalam kepengurusan komite madrasah untuk merencanakan dan mengevaluasi program-program, maka rasa memiliki masyarakat terhadap sekolah dapat meningkatkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab yang selanjutnya akan meningkatkan pengabdian masyarakat terhadap sekolah dan dunia pendidikan pada umumnya.

Komite madrasah yang ada di MTs N I Model Palembang sangat aktif, baik dan lancar.[[56]](#footnote-57) Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa ditengah-tengah sekolah gratis yang sudah jadi bagian program pemerintah, maka komite madrasah tidak seaktif dahulu tetapi walaupun demikian secara moral dan rasa tanggung jawab komite madrasah tetap berperan. Komite madrasah akan terus dilibatkan dalam setiap kegiatan dengan meminta arahan dan dukungan dari komite terhadap kegiatan yang ada di madrasah seperti pada saat pembangunan, penyerahan ijazah, perpisahan siswa kelas Sembilan, peringatan hari-besar Islam dan hari besar nasional.[[57]](#footnote-58)

Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut, peran komite madrasah itu tidak hanya sekedar terpaut pada material tetapi juga immaterial, sehingga dalam membantu madrasah tidak hanya mengeluarkan dan mencari dana saja melainkan juga tenaga serta pikiran untuk meningkatkan kualitas madrasah.

Berkenaan dengan fasilitas pembelajaran yang berupa sarana prasarana komite madrasah tidak terlalu dilibatkan, karena madrasah dapat mencukupi dan melengkapi sarana dan prasarana yang belum ada dengan adanya dana bantuan operasional sekolah (BOS) dari pemerintah. Namun walaupun demikian, karena soal dana ini adalah masalah yang sangat sensitif jadi tentang kejelasan dari penggunaan dana tersebut sekolah tetap transparan dan meminta saran dari pengurus komite madrasah, sehingga tidak terjadi perselisihan dan kesalah pahaman dalam penggunaan dana yang harus digunakan dalam pembangunan sarana dan prasarana maupun pengadaan sumber belajar.[[58]](#footnote-59) Dijelaskan lagi oleh Ibu Nurbani sebagai Kepala Tata Usaha MTs N I Model Palembang bahwa, komite madrasah tidak terlalu terlibat dalam hal pembangunan sarasa dan prasarana, semua ini imbas dari diterapkannya sistem sekolah gratis yang mengakibatkan sebagian wali murid menganggap kalau sekolah sudah gratis, jadi semuanya juga gratis.[[59]](#footnote-60)

Senada dengan yang telah disampaikan oleh kepala madrasah maupun waka kurikulum di atas ibu Nurmala yang juga anggota dari komite madrasah di MTs N I Model Palembang mengungkapkan bahwa mengenai sarana dan prasarana di madrasah, komite madrasah tidak terlibat langsung dalam pembangunan maupun pencarian dana tetapi untuk perencanaan maupun mengenai hasilnya komite madrasah tetap dimintai persetujuan dan pertimbangannya.[[60]](#footnote-61)

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa walaupun pemerintah sudah menerapkan sekolah gratis dengan adanya dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang berarti berkurangnya peran komite sekolah khususnya dalam pencarian dana pendidikan, tetapi komite madrasah di MTs N I Model Palembang tetap berperan seperti memberikan pandangan, pemberian ide, dan pemikiran serta pertimbangan dari program-program yang direncanakan madrasah. Selain itu juga ketika madrasah ingin mengadakan acara baik acara kesiswaan maupun kemasyarakatan, sekolah tetap harus minta pertimbangan, pendapat dan saran dari komite madrasah. Jadi, komite madrasah tetap aktif dan terus berperan sebagai mitra dari madrasah yang senantiasa mendukung dan sebagai wadah dari aspirasi masyarakat dalam dunia pendidikan di madrasah.

1. **Peran Komite Madrasah Dalam Penerapan Manajemen Berbasis Madrasah di MTs N I Model Palembang**

Manajemen berbasis madrasah adalah sebuah manajemen yang secara umum pengelolaannya di kelola oleh madrasah sendiri atau bisa di sebut juga dengan manajemen kemandirian. Intinya adalah sebuah bentuk kemandirian madrasah dalam mengelola madrasah sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan madrasah itu sendiri, sehingga madrasah bisa dipandang sama dengan kualitas yang dimiliki sekolah umum lainnya. Penerapan manajemen berbasis madrasah dapat diketahui dari hasil wawancara yang penulis uraikan di bawah ini. Adapun wawancara yang penulis lakukan oleh penulis adalah:

Dalam penerapannya, manajemen berbasis madrasah diterapkan dengan baik sesuai dengan kurikulum MBM yang ada, salah satu bentuknya ialah kepala madrasah yang sigap dengan perkembangan yang terjadi dan segera mengambil sikap dan tindakan yang sesuai dan pantas ketika harus diterapkan di madrasah.[[61]](#footnote-62) Hal yang sama juga disampaikan oleh kepala madrasah yang mengatakan bahwa penerapan manajemen berbasis madrasah di MTs N I Model Palembang sangat berjalan dengan baik, dimana kepala madrasah selaku pusat komando di madrasah selalu menerapkan sistem pengelolaan dengan baik.[[62]](#footnote-63) lebih lanjut ibu Yeni Sufri Yani mengatakan, penerapan manajemen berbasis madrasah dapat berjalan dengan baik tidak terlepas dari pendukung yang ada antara lain tenaga pengajar yang mengerti posisinya dan ditempatkan sesuai dengan bidangnya masing-masing sehingga tidak ada guru atau karyawan yang bingung dengan bidang yang dia tempati, sarana prasarana yang baik seperti leboratorium komputer yang dilengkapi dengan hospot sehingga madrasah sigap dan tanggap terhadap kemajuan tekhnologi dan informasi yang ada di sekitar. Madrasah selalu aktif dengan tuntutan dan kemajuan yang ada di masyarakat, tapi di samping itu, madrasah madrasah tetap menerapkan pola pembelajaran yang berasaskan agama seperti menambahkan pelajaran IMTAQ pada akhir setiap akhir jam pelajaran sehingga di samping siswa mampu dalam IPTEK dan berprestasi dalam pelajaran umum, siswa juga dibekali ilmu tentang hablumminallah dan hablumminannas yang berjalan dengan baik. Intinya adalah ketika madrasah mampu menghasilkan output yang baik dan berkualitas maka penerapan manajemen berbasis madrasah dianggap diterapkan dengan baik[[63]](#footnote-64)

Pola pendidikan yang mandiri diterapkan oleh MTs N I Model Palembang sesuai dengan karakteristik dari manajemen berbasis madrasah diterapkan dengan baik yang semua itu bisa terapkan dengan tidak terlepasnya dari peran kepala madrasah yang paham mengerti dengan keperluan dan kebutuhan madrasah baik berupa tenaga pengajar yang profesional, sarana dan prasarana sebagai penunjang pembelajaran seperti laboratorium IPA, komputer dan perpustakaan serta komponen-komponen lain yang merupakan pendukung dalam membangun madrasah supaya menjadi lebih baik.[[64]](#footnote-65)

Madrasah ini (MTs N I Model Palembang) menerapkan manajemen yang berbasis madrasah (MBM) dengan baik. Salah satu contohnya adalah peran aktif dari seorang kepala madrasah yang selalu melibatkan guru dan karyawan serta komite madrasah dalam mengambil keputusan atau sebuah kebijakan yang berkenaan dengan madrasah, baik itu yang berkaitan dengan tenaga pengajar (keprofesionalan guru dalam mengajar), penggunaan sarana yang ada, pembangunan sarana dan prasarana serta kedisiplinan yang diterapkan di MTs N I Model Palembang baik terhadap guru dan karyawan serta siswa madrasah.[[65]](#footnote-66)

MTs N I Model Palembang yang dimotori oleh kepala madrasah selalu menerapkan manajemen berbasis madrasah dengan baik. Kepala madrasah selalu aktif dalam mengawasi proses pembelajaran yang ada di madrasah, selalu terbuka dengan masuka-masukan serta saran yang diberikan oleh guru serta karyawan, dan selalu melibatkan guru dan karyawan dalam setiap mengambil kebijakan yang berkaitan dengan madrasah. Manajemen yang sangat baik diterapkan madrasah mengantarkan madrasah memperoleh akreditasi A (amat baik) yang merupakan sebuah bukti bahwa madrasah mempunyai manajemen yang baik.[[66]](#footnote-67)

Dari beberapa wawancara di atas dapat ditarik intisarinya tentang peran komite terhadap penerapan manajemen berbasis madrasah yaitu madrasah mampu menerapkan manajemen yang berbasis kemandirian atau yang biasa disebut dengan manajemen berbasis madrasah ini dengan baik sesuai dengan pedoman kurikulum MBM yang ada. Kalau dilihat secara umum jelas bahwa tercapainya madrasah di sebuah nilai akreditasi A merupakan sebuah bukti sangat baiknya manajemen yang diterapkan oleh madrasah dalam membangun pola pendidkan yang mandiri di madrasah. Dalam penerapannya, madrasah sudah pasti mengalami hambatan namun berkat bijaknya kepala madrasah dan dengan terjalinnya sebuah kerja sama yang baik dengan semua perangkat yang ada seperti para dewan guru dan karyawan serta selalu melibatkan komite madrasah dalam membangun madrasah maka semua kendala yang ada dapat diatasi dengan baik serta terus meningkatkan kualitas sumberdaya yang ada di madrasah.

1. **Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Manajemen Berbasis Madrasah di MTs N I Model Palembang**

Pemindahan wewenang pengelolaan ke tingkat madrasah yang dilakukan oleh pemerintah pada saat ini mengakibatkan peran kepala madrasah di MTs N I Model Palembang menjadi sangat krusial dan sangat kuat dalam pendidikan di madrasah. Selain mempunyai tanggung jawab yang besar dalam program-program madrasah, kepala madrasah juga harus memperhatikan beberapa hal seperti penghambat maupun hal yang menjadi pendukung dalam penerapan manajemen berbasis madrasah sehingga kepala madrasah dapat memaksimalkan perannya selaku pusat pengendalian kebijakan di madrasah.

Beberapa faktor pendukung maupun penghambat madrasah dalam penerapan manajemen berbasis madrasah di MTs N I Model Palembang. Adapun pendukung maupun penghambatnya dapat di ketahui berdasarkan dari wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa instumen di bawah ini:

Dalam penerapannya manajemen berbasis madrasah sudah pasti ada beberapa hal yang menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaannya, yang utama adalah sebuah kedisiplinan yang tinggi patut dikedepankan oleh semua lapisan perangkat madrasah, mulai dari kepala madrasah sebagai panutan, dewan guru dan karyawan yang merupakan sumber belajar yang paling mudah ditiru dan diamati siswa serta pola kedisiplinan siswa.[[67]](#footnote-68) Lebih lanjut Ibu Yeni mengatakan bahwa, tempat atau lokasi sekolah yang strategis yang mudah dijangkau dari berbagai tempat adalah salah satu pendukung dari kemajuan madrasah. Selain itu, fakor ekonomi adalah sebuah pendukung yang juga sangat sangat mempengaruhi optimalnya madrasah dalam menerapkan manajemen berbasis madrasah, karena secara umum juga dapat dilihat perbedaan mendasar pada diri siswa yang ekonominya tinggi salah satu contohnya adalah siswa yang dirumahnya mempunyai perangkat komputer dan internet dengan yang tidak memiliki perangkat tersebut, dan hal yang seperti itu sangat mendukung siswa dalam pemanfaatan sumber belajar tersebut yang merupakan salah satu cara yang dilakukan madrasah dalam meningkatkan kualitas madrasah. Begitupun sebaliknya, ekonomi merupakan salah satu faktor penghambat penerapan manajemen berbasis madrasah. [[68]](#footnote-69)

Dari pernyataan di atas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa salah satu faktor pendukung suksesnya penerapan manajemen berbasis madrasah yang diterapkan di madrasah ini adalah faktor internal siswa yang secara ekonomi keluarganya yang juga mendukung untuk mencukupi segala kebutuhan dalam menunjang proses pembelajaran menjadi lebih baik, karena hal ini akan lebih memudahkan dan melancarkan madrasah untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri siswa sehingga manajemen berbasis madrasah dapat berjalan dengan baik dalam penerapannya serta tidak keluar dari kebutuhan dan kemampuan peserta didik guna mencapai hasil yang maksimal.

Menurut Ibu Nurbani, yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan manajemen berbasis madrasah di MTs N I Model Palembang salah satunya adalah guru yang profesional baik secara akademiknya maupun dalam penerapannya di dalam mendidik. Selain itu juga sarana prasarana yang lengkap dan baik yang digunakan di madrasah seperti labor bahasa, labor IPA, komputer serta perpustakaan.[[69]](#footnote-70) Dilanjutkan dengan paparan dari Ibu Zainab selaku Waka Kurikulum di MTs N I Model Palembang bahwa hal yang menjadi pendukung berjalannya manajemen berbasis madrasah ialah tenaga pengajar yang cukup, profesional serta berjalan pada jalurnya. Maksudnya adalah, guru itu mengajar sesuai bidang yang dikuasainya dan tidak mengajar pada bidang yang tidak dikuasainya.[[70]](#footnote-71)

Dari hasil wawancara yang penulis paparkan di atas dapat disimpulkan bahwa walaupun pemerintah telah menerapkan sekolah gratis dengan adanya dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang itu berarti berkurangnya peran komite selaku mitra madrasah dalam mencari dana baik dari masyarakat maupun dunia usaha guna membangun sumber daya maupun sumber dana di madrasah, namun komite madrasah MTs N I Model Palembang sangat berperan dengan baik sebagai pengontrol, pemberi pertimbangan dalam pendidikan di madrasah. Didukung dengan sumberdaya pendidik yang professional, pola demokrasi yang diterapkan kepala madrasah serta kedisiplinan yang tinggi juga merupakan pendukung penting suksesnya penerapan manajemen berbasis madrasah di MTs N I Model Palembang. Dengan demikian nantinya diharapkan dapat menghasilkan output yang berkualitas.

Begitupula peran komite madrasah dalam penerapan manajemen berbasis madrasah yang diterapkan madrasah, komite selalu memberikan masukan serta saran guna membangun madrasah supaya lebih baik lagi sehingga dapat menghasilkan output yang berkualitas dan bermanfaat sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat bangsa dan Negara.

Disamping faktor pendukung, jelas ada beberapa factor penghambat madrasah dalam mengoptimalkan penerapan manajemen berbasis madrasah di MTs N I Model Palembang. Beberapa faktor penghambat dari penerapan menajemen berbasis madrasah adalah:

Selain memajukan bidang ilmu pengetahuan umum, madrasah juga selalu memberikan pembinaan akhlak serta ilmu keagamaan pada anak didik. Pembekalan ini mempunyai jadwal khusus yaitu diberikan pelajaran IMTAQ pada jam kesembilan jam pelajaran, artinya itu dimulai pada jam 12 sampai jam 1 siang. Hal inilah yang membuat banyaknya orang tua atau wali murid yang khawatir dengan anaknya yang pulang sekolah lewat dari jam 12 siang, yang mana itu menjadi salah satu hambatan atau kendala yang dihadapi madrasah dalam mengoptimalkan pendidikan di madrasah, dan itu berarti terhambatnya penerapan manajemen berbasis madrasah secara baik dan sempurna.[[71]](#footnote-72) Lebih lanjut beliau menanbahkan bahwa kedisiplinan yang kurang baik, seperti ada yang sering terlambat datang kesekolah. Hal ini kembali kepada faktor ekonomi keluarga yang kurang mendukung untuk memperlancar siswa datang ke sekolah dengan tepat waktu. Dengan ini juga sudah pasti menjadi salah satu penghambat maksimalnya manajemen berbasis madrasah yang baik dan sempurna.[[72]](#footnote-73)

Bebrapa faktor seperti kurangnya beberapa alat peraga sebagai salah satu penunjang proses pembelajaran, juga mengakibatkan kurang maksimalnya penerapan manajemen berbasis madrasah di MTs N I Model Palembang.[[73]](#footnote-74) Selain itu, faktor ekonomi keluarga juga menjadi salah satu kendala madrasah dalam mengoptimalkan penerapan manajemen berbasis madrasah di MTs N I Model Palembang.[[74]](#footnote-75)

Dengan demikian, beberapa faktor penghambat seperti faktor kedisiplinan, faktor ekonomi keluarga serta rasa kehawatiran orang tua yang tinggi terhadap anaknya juga sangat mempengaruhi penerapan manajemen berbasis madrasah secara optimal sesuai panduan serta harapan dari madrasah.

**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**
2. Peran komite madrasah di MTs N I Model Palembang secara umum berperan dengan baik, hanya saja setelah adanya program sekolah gratis dari pemerintah dengan diterimanya dana bantuan operasional sekolah oleh madrasah, komite madrasah tidak lagi berperan sebagai pendukung sumber dana (pencari dana) pendidikan namun komite madrasah tetap menjalankan perannya sebagai mitra madrasah yaitu sebagai badan pertimbangan, pendukung, pengontrol serta mediator. Komite madrasah MTs N I Model Palembang selalu terlibat dalam setiap pengambilan keputusan dan kebijakan madrasah tentang pembangunan, kegiatan-kegiatan dalam rangka membangun sumberdaya yang ada di madrasah sehingga dapat menghasilkan generasi yang berkualitas.
3. Komite madrasah MTs N I Model Palembang terhadap penerapan manajemen berbasis madrasah sangat baik. Komite selalu memberikan pertimbangan serta saran kepada madrasah tentang apa-apa yang harus diperbaiki baik sarana dan prasarana maupun tentang kepegawayan di madrasah guna memaksimalkan manajemen yang mandiri serta sesuai dengan ninti dari manajemen berbasis madrasah. Dalam hal pendanaan serta pembangunan dimadrasah, meskipun madrasah sudah mendapatkan bantun operasional sekolah (BOS) dari pemerintah untuk menunjang pembiayaan madrasah namun komite madrasah selaku mitra madrasah di MTs N I Model Palembang terus berperan dengan baik sebagai pendukung madrasah dalam memaksimalkan penerapan manajemen berbasis madrasah.
4. Berbagai faktor seperti kedisiplinan, ekonomi keluarga serta dukungan dari wali murid sangat mempengaruhi penerapan manajemen berbasis madrasah dalam meningkatkan kualitas madrasah.
5. **Saran-saran**

Dengan mengoptimalkan penerapan manajemen berbasis madrasah yang didukung oleh komite madrasah dalam rangka meningkatkan kualitas madrasah, diharapkan semua pihak madrasah dapat bekerjasama dengan dengan baik dalam membangun madrasah serta meningkatkan sumberdaya dengan maksimal sehingga dapat menghasilkan output yang berkualitas dan siap bersaing di bidang akademik dengan didasari oleh iman dan akhlak yang mulia.

Bagi masyarakat hendaknya lebih memperhatikan pendidikan dan meningkatkan partisipasi serta kepeduliannya terhadap madrasah baik tenaga, pikiran bahkan materi guna meningkatkan kualitas madrasah, karena untuk menciptakan madrasah yang berkualitas itu perlu adanya peran dari seluruh stakeholder dalam pendidikan.

**DAFTAR PUSTAKA**

Amilda, dkk, 2010. *Manajemen Pendidikan Islam*, Palembang: Grafika Telindo Fress,

Dharma Agus, 2003. *Manajemen Supervisi,* Jakarta: Raja Grafika Persada

Bendjo Sujanto, 2007. *Manajemen Berbasis Sekolah*, *Model Pengelolaan Sekolah di Era Otonomi Daerah,* Jakarta: CV. Sagung Seto.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990. *Kamus Besar Bahasa* Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.

Rosyada Dede, 2004. *Paradigma Pendidikan Demokrasi : Sebuah Model Pelibatan Masyarakat dalam Pendidikan*, Bandung: Cekas Grafika.

Mulyasa. E, 2004. *Manajemen berbasis Sekolah*, Jakarta: Rosda.

E. Mulyasa dkk, 2003. *Pedoman Komite madrasah*: Departemen Agama RI: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam.

Hasbullah, 2006. *Otonomi Pendidikan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Tilaar HAR, 2003. *Kekuasaan dan Pendidikan : Suatu Tinjauan dari Perspektif Kultural*, Magelang: Indonesianetra.

Duhou Abu Ibtisam, 2004. *School Based Management*, Jakarta:Kencana.

Pidarta Made, 1998. *Manajemen Pendidikan Indonesia,* Jakarta: Bina Aksar.

Fatah Nanang, 2003. *Konsep Manajemen berbasis Sekolah dan Dewan Sekolah,*  Bandung:Pustaka Bani Quraisy.

Nurkholis, 2003. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Jakarta: Grasindo.

Annur Saiful, 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan,* Palembang: Grafika Telindo Press.

Assauri Sofjan, 2009. *Manajemen Pemasaran,* Jakarta: Raja Grafika Persada.

Danim Sudarman, 2007, *Visi Baru Manajemen Sekolah.* Jakarta: Bumi Aksara.

Arikunto Suharsimi dkk, 2007. *Evaluasi Program Pendidikan,* Jakarta: Bumi Aksara.

Umaidi, 2004. *Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah*, Jakarta: CEQM.

*Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,* Bandung: Fokusmedia.

Ahmad Wardini, 2005. *Buku Pedoman Penelitian Skripsi dan Karya Ilmiah*, Palembang: IAIN Raden Fatah.

Widodo, 2002. *Kamus Ilmiah Popular*, Yogyakarta: Absolute.

<http://abyfarhan7.blogspot.com/2011/12/komitesekolah.html#ixzz1njRfiHXB>

<http://aphe.wordpress.com/2008/06/26/sistem-klasifikasi/>

<http://dunia-fikri.blogspot.com/2010/01/komite-sekolah.html>

<http://id.wikipedia.org/wiki/klasifikasi>

http//Komite Sekolah, [*www.komitesekolah.or.id/ks\_pembentukan.com*](http://www.komitesekolah.or.id/ks_pembentukan.com)

http//Verivikasi htt://www.akademik.unsri.ac.id

http://www.bahtera.org/kateglo/?mod=dict&action=view&phrase=verifikasi

http:// [www.dikdasmen.depdiknas.go.id](http://www.dikdasmen.depdiknas.go.id).

http//www.komitesekolah.or.id/ks\_perandanfungsi.com

1. UU Nomor 20 tahun 2003 Tentang System Pendidikan Nasional [↑](#footnote-ref-2)
2. E. Mulyasa, *Pedoman Manajemen berbasis Madrasah.* (Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2003), hal. 2 [↑](#footnote-ref-3)
3. Nurkholis, *Manajemen Berbasis Sekolah*. (Jakarta: Grasindo, 2003), hal. 107 [↑](#footnote-ref-4)
4. http:// [www.dikdasmen.depdiknas.go.id](http://www.dikdasmen.depdiknas.go.id), (diakses pada: Sabtu 24 Maret 2012). [↑](#footnote-ref-5)
5. http//www.landasankomitemadrasah/blogspot.com [↑](#footnote-ref-6)
6. <http://abyfarhan7.blogspot.com/2011/12/komite-sekolah.html#ixzz1njRfiHXB> [↑](#footnote-ref-7)
7. E. Mulyasa, *Pedoman Manajemen berbasis Madrasah.* (Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2003), hal. 13 [↑](#footnote-ref-8)
8. Sudarman Danim, *Visi Baru Manajemen Sekolah.* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hal. 17 [↑](#footnote-ref-9)
9. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa* Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 667 [↑](#footnote-ref-10)
10. *Ibid,*  hal. 935 [↑](#footnote-ref-11)
11. Dian Cahyani Fitri, *Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Palembang,* (Palembang: Skripsi Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah, 2009). [↑](#footnote-ref-12)
12. Manzur Jamil, *Otonomisasi Madrasah dalam Perspektif Manajemen Berbasis Madrasah (MBM),* (Palembang: Skripsi Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah, 2005). [↑](#footnote-ref-13)
13. Wardini Ahmad, *Buku Pedoman Penelitian Skripsi dan Karya Ilmiah*, (Palembang: IAIN Raden Fatah,2005), hal. 9 [↑](#footnote-ref-14)
14. Made Pidarta, *Manajemen Pendidikan Indonesia,* (Jakarta: Bina Aksara, 1998), hal. 201 [↑](#footnote-ref-15)
15. http//www.komitesekolah.or.id/ks\_perandanfungsi.com [↑](#footnote-ref-16)
16. <http://abyfarhan7.blogspot.com/2011/12/komite-sekolah.html#ixzz1njRfiHXB> [↑](#footnote-ref-17)
17. http://dunia-fikri.blogspot.com/2010/01/komite-sekolah.html [↑](#footnote-ref-18)
18. E. Mulyasa, *Pedoman Manajemen berbasis Madrasah.* (Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2003), hal. 15-17 [↑](#footnote-ref-19)
19. Saiful Annur, *Metodologi Penelitian Pendidikan,* (Palembang: Grafika Telindo Press, 2008), hal. 129 [↑](#footnote-ref-20)
20. http://www.bahtera.org/kateglo/?mod=dict&action=view&phrase=verifikasi [↑](#footnote-ref-21)
21. Verivikasi htt://www.akademik.unsri.ac.id [↑](#footnote-ref-22)
22. http://id.wikipedia.org/wiki/klasifikasi [↑](#footnote-ref-23)
23. http://aphe.wordpress.com/2008/06/26/sistem-klasifikasi/ [↑](#footnote-ref-24)
24. Widodo, *Kamus Ilmiah Popular*, (Yogyakarta: Absolute, 2002), hal. 97 [↑](#footnote-ref-25)
25. Suharsimi Arikunto dkk, *Evaluasi Program Pendidikan,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hal. 136. [↑](#footnote-ref-26)
26. HAR Tilaar, *Kekuasaan dan Pendidikan : Suatu Tinjauan dari Perspektif Kultural*, (Magelang: Indonesianetra, 2003), hal. 309 [↑](#footnote-ref-27)
27. *Ibid,* hal*.* 310 [↑](#footnote-ref-28)
28. Dede Rosyada, *Paradigma Pendidikan Demokrasi : Sebuah Model Pelibatan Masyarakat dalam Pendidikan*, (Bandung: Cekas Grafika, 2004, hal. 4-7 [↑](#footnote-ref-29)
29. Sofjan Assauri, *Manajemen Pemasaran,* (Jakarta: Raja Grafika Persada, 2010), hal. 12 [↑](#footnote-ref-30)
30. Agus Dharma, *Manajemen Supervisi,* (Jakarta: Raja Grafika Persada, 2003), hal. 1 [↑](#footnote-ref-31)
31. Amilda, dkk, *Manajemen Pendidikan Islam*, (Palembang: Grafika Telindo Fress, 2010), hal. 1 [↑](#footnote-ref-32)
32. Ibtisam Abu Duhou, *School Based Management*, (Jakarta:Kencana 2004), hal. 7 [↑](#footnote-ref-33)
33. Bendjo Sujanto , *Manajemen Berbasis Sekolah*, *Model Pengelolaan Sekolah di Era Otonomi Daerah,* (Jakarta: CV. Sagung Seto, 2007), hal. 30 [↑](#footnote-ref-34)
34. E. Mulyasa, *Manajemen berbasis Sekolah*, (Jakarta:Rosda 2004), cet ke.7, hal. 24 [↑](#footnote-ref-35)
35. Nanang Fatah, *Konsep Manajemen berbasis Sekolah dan Dewan Sekolah* . (Bandung:Pustaka Bani Quraisy 2003), hal. 8 [↑](#footnote-ref-36)
36. Sudarman Danim, *Visi Baru Manajemen Sekolah.* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hal. 79 [↑](#footnote-ref-37)
37. E. Mulyasa dkk, *Pedoman Komite madrasah*: (Departemen Agama RI: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2003), Hlm. 14. [↑](#footnote-ref-38)
38. E. Mulyasa, *Pedoman Manajemen berbasis Madrasah.* (Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2003), hal. 13 [↑](#footnote-ref-39)
39. *Ibid* [↑](#footnote-ref-40)
40. E. Mulyasa, *Manajemen berbasis Sekolah*, (Jakarta:Rosda 2004), cet ke.7, hal. 13 [↑](#footnote-ref-41)
41. Umaidi, *Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah*, (Jakarta: CEQM, 2004), hal. 35 [↑](#footnote-ref-42)
42. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa* Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hal. 667 [↑](#footnote-ref-43)
43. Hasbullah, *Otonomi Pendidikan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal. . 89-90 [↑](#footnote-ref-44)
44. *Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,* (Bandung: Fokusmedia,2003), hal.6 [↑](#footnote-ref-45)
45. http//www.komitesekolah.or.id/kspengertiandannama.com [↑](#footnote-ref-46)
46. Komite Sekolah, *www.komitesekolah.or.id/ks\_pembentukan.com* [↑](#footnote-ref-47)
47. Made Pidarta, *Manajemen Pendidikan Indonesia,* (Jakarta: Bina Aksara, 1998), hal. 201 [↑](#footnote-ref-48)
48. http//www.komitesekolah.or.id/ks\_perandanfungsi.com [↑](#footnote-ref-49)
49. <http://abyfarhan7.blogspot.com/2011/12/komite-sekolah.html#ixzz1njRfiHXB> [↑](#footnote-ref-50)
50. Dokumentasi MTs N I Model Palembang, 26 Mei 2012 [↑](#footnote-ref-51)
51. *Ibid* [↑](#footnote-ref-52)
52. Nurbani, Kepala Tata Usaha MTs N I Model Palembang, *Wawancara,* Palembang, 21 Mei 2012 [↑](#footnote-ref-53)
53. *http//www.komitesekolah.or.id/ks\_perandanfungsi.com* [↑](#footnote-ref-54)
54. Zainab, Waka Kurikulum MTs N I Model Palembang, *Wawancara,* Palembang, 26 Mei 2012 [↑](#footnote-ref-55)
55. Nurmala Depi, Anggota Pengurus Komite Madrasah, MTs N I Model Palembang, *Wawancara,* 26 Mei 2012 [↑](#footnote-ref-56)
56. Zikri, Waka Bidang sarana dan Prasarana MTs N I Model Palembang, *Wawancara,* Palembang, 7 Juni 2012 [↑](#footnote-ref-57)
57. *Ibid* [↑](#footnote-ref-58)
58. Yeni Sufri Yani, Kepala Madrasah MTs N I Model Palembang, *Wawancara,* Palembang, 21 Mei 2012 [↑](#footnote-ref-59)
59. Nurbani, Kepala Tata Usaha MTs N I Model Palembang, *Wawancara,* Palembang, 21 Mei 2012 [↑](#footnote-ref-60)
60. Nurmala Depi, Anggota Pengurus Komite Madrasah, MTs N I Model Palembang, *Wawancara,* 26 Mei 2012 [↑](#footnote-ref-61)
61. Zainab, Waka Kurikulum MTs N I Model Palembang, *Wawancara,* Palembang, 26 Mei 2012 [↑](#footnote-ref-62)
62. Yeni Sufri Yani, Kepala Madrasah MTs N I Model Palembang, *Wawancara,* Palembang, 21 Mei 2012 [↑](#footnote-ref-63)
63. *Ibid* [↑](#footnote-ref-64)
64. Nurbani, Kepala Tata Usaha MTs N I Model Palembang, *Wawancara,* Palembang, 21 Mei 2012 [↑](#footnote-ref-65)
65. Nurmala Depi, Anggota Pengurus Komite Madrasah, MTs N I Model Palembang, *Wawancara,* 26 Mei 2012 [↑](#footnote-ref-66)
66. Zikri, Waka Bidang sarana dan Prasarana MTs N I Model Palembang, *Wawancara,* Palembang, 7 Juni 2012 [↑](#footnote-ref-67)
67. Yeni Sufri Yani, Kepala Madrasah MTs N I Model Palembang, *Wawancara,* Palembang, 21 Mei 2012 [↑](#footnote-ref-68)
68. *Ibid* [↑](#footnote-ref-69)
69. Nurbani, Kepala Tata Usaha MTs N I Model Palembang, *Wawancara,* Palembang, 21 Mei 2012 [↑](#footnote-ref-70)
70. Zainab, Waka Kurikulum MTs N I Model Palembang, *Wawancara,* Palembang, 26 Mei 2012 [↑](#footnote-ref-71)
71. Zikri, Waka Bidang sarana dan Prasarana MTs N I Model Palembang, *Wawancara,* Palembang, 7 Juni 2012 [↑](#footnote-ref-72)
72. *Ibid* [↑](#footnote-ref-73)
73. Nurbani, Kepala Tata Usaha MTs N I Model Palembang, *Wawancara,* Palembang, 21 Mei 2012 [↑](#footnote-ref-74)
74. Yeni Sufri Yani, Kepala Madrasah MTs N I Model Palembang, *Wawancara,* Palembang, 21 Mei 2012 [↑](#footnote-ref-75)